



LAPORAN KINERJA

2025

**INTERIM
TRIWULAN I**

BALAI POM DI KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.42,
Banjaran, Kec. Kota, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur 64129
www.kediri.pom.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri Triwulan I Tahun 2025 dapat selesai tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Kediri Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai POM di Kediri Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM RI. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Kediri Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Kediri pada tahun selanjutnya.



Kediri, 23 April 2025

Kepala Balai POM di Kediri

Winanto, S.Si, Apt., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Kediri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Badan POM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Balai POM di Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 mengacu pada Sasaran Kinerja yang tertuang dalam Renstra Balai POM Kediri 2025-2029 yakni terdiri dari 9 sasaran kinerja dengan 25 indikator kinerja utama.

Sasaran Kegiatan Balai POM di Kediri yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
8. Layanan Publik UPT yang prima
9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Dari 9 sasaran kinerja yang dievaluasi, hanya 7 sasaran strategis yang bisa dievaluasi karena realisasi indikator dari 2 sasaran kinerja lain baru dapat diperoleh pada penilaian di akhir tahun. Dari 7 sasaran kinerja yang dievaluasi, diperoleh hasil capaian Nilai Kinerja Organisasi “**BAIK**”. Hasil capaian tiap sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 107,10% dengan kriteria **Sangat Baik**;
2. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 11,5% dengan kriteria **Kurang**;
3. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 122,88% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**;
4. Capaian Indikator keempat sebesar 101,64% dengan kriteria **Sangat Baik**,;

5. Capaian indikator kelima sebesar 100% dengan kriteria **Baik**;
6. Capaian indikator keenam sebesar 81,97% dengan kriteria **Cukup**;
7. Capaian Indikator ketujuh sebesar 83,32% dengan kriteria **Cukup**;
8. Belum ada capaian indikator pada sasaran kinerja kedelapan pada Triwulan I 2025 karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun;
9. Belum ada capaian indikator pada sasaran kinerja kesembilan pada Triwulan I 2025 karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

Persentase capaian Indikator Kinerja Balai POM di Kediri pada triwulan I tahun 2025 antara 11,5 % sampai dengan 122,88 %. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi” disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pada sarana produksi pangan fortifikasi sebagai dampak dari efisiensi anggaran Sedangkan capaian indikator tertinggi pada indikator “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, faktor yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah karena telah tersedianya laboratorium pengujian level 1 di Balai POM Kediri serta didukung dengan SDM yang kompeten dan berdedikasi.

Untuk mendukung capaian 9 Sasaran Kinerja, Balai POM di Kediri melaksanakan 25 kegiatan utama dengan tingkat efisiensi anggaran 24 kegiatan “tidak efisien” dan 1 kegiatan “efisien”. Nilai Tingkat efisiensi kegiatan diperoleh bervariasi antara 75 % sampai dengan 90%.

Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kediri untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis didukung anggaran APBN sebesar Rp 24.238.563.000, namun pada awal tahun Presiden menerbitkan instruksi untuk efisiensi anggaran. Anggaran Balai POM dilakukan efisiensi sebesar 15.252.911.000 sehingga anggaran yang bisa digunakan hanya sebesar 9.005.252.000. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 adalah Rp 1.718.664.252,- atau sebesar 19,09%.

Kendala yang dihadapi Balai POM di Kediri atas belum optimalnya capaian Sasaran Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 adanya efisiensi anggaran pada awal tahun sehingga kegiatan-kegiatan strategis yang mendukung pengawasan tertunda pelaksanaannya. Dengan adanya efisiensi anggaran ini menjadikan tantangan bagi Balai POM di Kediri untuk berinovasi sehingga tetap dapat berkinerja optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Periode selanjutnya, Balai POM di Kediri berupaya melakukan

perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2025. Namun pada akhir triwulan I tahun 2025, beberapa kegiatan dikembalikan anggarannya (dibuka blokir) sehingga Balai POM akan memperbaiki capaian Sasaran kegiatan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PoA yang telah ditetapkan
- Memodifikasi kegiatan antara lain dengan hybrid (luring dan daring)
- Mempercepat pengadaan barang dan jasa yang belum terlaksana pada Triwulan I
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan segera melakukan optimalisasi kegiatan yang tidak terlaksana.

HIGHLIGHT KINERJA

Pada periode TW I tahun 2025, Balai POM di Kediri terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja. Salah satu langkah nyata berupa komitmen untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini bertujuan menciptakan budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh lingkungan Organisasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Balai POM di Kediri antara lain:

1. Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai;
2. Menciptakan inovasi yang memiliki daya ungkit terhadap kinerja dan pelayanan publik;
3. Melakukan internalisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan *awareness* pegawai terhadap pentingnya Reformasi Birokrasi.

Selain itu, Balai POM di Kediri juga mendorong inovasi dalam manajemen kinerja, antara lain melalui pengembangan sistem pemantauan berbasis digital dan penerapan metode evaluasi kinerja berbasis *outcome* untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Manajemen kinerja yang efektif akan berdampak pada produktivitas pegawai sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT KINERJA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
BAB IV PENUTUP	216
LAMPIRAN I	219

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kerja Balai POM di Kediri	3
Gambar 2 Struktur Organisasi UPT BPOM	5
Gambar 3 Chart Kinerja UPT	13
Gambar 4 Renstra 2025 - 2029	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jarak Tempuh ke Wilayah Kerja	3
Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	22
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	27
Tabel 5 Kriteria Pencapaian Indikator Tahun 2025	31
Tabel 6 Pencapaian Nilai Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	35
Tabel 7 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025	37
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2025 dengan realisasi kinerja Triwulan I 2024	44
Tabel 9 Perbandingan target dan realisasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan 1 tahun 2025	46
Tabel 10 Perbandingan target tahunan dan realisasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan triwulan I tahun 2025	46
Tabel 11 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	46
Tabel 12 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	49
Tabel 13 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	49
Tabel 14 Perbandingan Target Dan Realisasi pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO Triwulan 1 Tahun 2025	50
Tabel 15 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	51
Tabel 16 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	51
Tabel 17 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	52
Tabel 18 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	52
Tabel 19 Perbandingan Target Dan Realisasi sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025	54
Tabel 20 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan	54
Tabel 21 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan	54
Tabel 22 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	56
Tabel 23 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	57
Tabel 24 Perbandingan Target Dan Realisasi sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan I tahun 2025	58
Tabel 25 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	58
Tabel 26 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	58
Tabel 27 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	60

Tabel 28 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	61
Tabel 29 Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62
Tabel 30 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62
Tabel 31 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62
Tabel 32 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	64
Tabel 33 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	65
Tabel 34 Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	66
Tabel 35 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	66
Tabel 36 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67
Tabel 37 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	68
Tabel 38 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	68
Tabel 39 Perbandingan Target Dan Realisasi Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025	70
Tabel 40 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	70
Tabel 41 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	70
Tabel 42 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	73
Tabel 43 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	74
Tabel 44 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025	76
Tabel 45 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	76
Tabel 46 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	76
Tabel 47 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	78
Tabel 48 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	79
Tabel 49 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025	80

Tabel 50 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
Tabel 51 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
Tabel 52 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	83
Tabel 53 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	83
Tabel 54 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025	85
Tabel 55 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
Tabel 56 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
Tabel 57 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	87
Tabel 58 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	87
Tabel 59 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025	88
Tabel 60 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89
Tabel 61 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89
Tabel 62 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	91
Tabel 63 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	92
Tabel 64 Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025 Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94
Tabel 65 Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025 pada Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025	94
Tabel 66 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94
Tabel 67 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	96
Tabel 68 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	97
Tabel 69 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan 1 Tahun 2025	99
Tabel 70 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	99
Tabel 71 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100

Tabel 72 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	101
Tabel 73 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	102
Tabel 74 Perbandingan target triwulan I dan realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I tahun 2024	104
Tabel 75 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	104
Tabel 76 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	104
Tabel 77 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	106
Tabel 78 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	107
Tabel 79 Perbandingan target triwulan I dan realisasi Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman sampai dengan triwulan I tahun 2025	108
Tabel 80 Perbandingan target tahunan 2024 dan realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2024 pada Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman	108
Tabel 81 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman	108
Tabel 82 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	111
Tabel 83 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	112
Tabel 84 Perbandingan Target TW I dengan realisasi Jumlah Desa Pangan Amansampai dengan triwulan I tahun 2025	112
Tabel 85 Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi samapai dengan triwulan I tahun 2025 pada Jumlah Desa Pangan Aman	113
Tabel 86 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2025 pada Jumlah Desa Pangan Aman	113
Tabel 87 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	116
Tabel 88 Tindak lanjut hasil evaluasi	117
Tabel 89 Perbandingan target TW I dan realisasi Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas sampai dengan triwulan I tahun 2025	119
Tabel 90 Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	119
Tabel 91 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	119
Tabel 92 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	123
Tabel 93 Tindak lanjut hasil evaluasi	123
Tabel 94 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan Triwulan 1 Tahun 2025	126
Tabel 95 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan	127
Tabel 96 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan	128
Tabel 97 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	129
Tabel 98 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	130

Tabel 99 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	132
Tabel 100 Perbandingan target tahunan 2025 dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	132
Tabel 101 Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	133
Tabel 102 Efisiensi penggunaan sumber daya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	134
Tabel 103 Tindak lanjut rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	134
Tabel 104 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	136
Tabel 105 Perbandingan target tahunan 2025 dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	137
Tabel 106 Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	137
Tabel 107 Efisiensi penggunaan sumber daya Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	138
Tabel 108 Tindak lanjut rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	139
Tabel 109 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Triwulan 1 Tahun 2025	140
Tabel 110 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Indeks Pelayanan Publik UPT	141
Tabel 111 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Indeks Pelayanan Publik UPT	141
Tabel 112 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	143
Tabel 113 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	143
Tabel 114 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Triwulan 1 Tahun 2025	146
Tabel 115 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	146
Tabel 116 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	147
Tabel 117 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	148
Tabel 118 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	148
Tabel 119 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Triwulan I Tahun 2025	149
Tabel 120 Perbandingan Target Tahunan 2025 dan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Nilai AKIP UPT BPOM	149
Tabel 121 Perbandingan Capaian Triwulan I tahun 2025 dengan Capaian Triwulan I Tahun 2024 pada Nilai AKIP UPT BPOM	149
Tabel 122 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	150

Tabel 123 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	151
Tabel 124 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	155
Tabel 125 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	156
Tabel 126 Perbandingan target tahunan 2025 dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	156
Tabel 127 Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	157
Tabel 128 Efisiensi penggunaan sumber daya Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	158
Tabel 129 Tindak lanjut rekomendasi Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	158
Tabel 130 Perbandingan Target Dan Realisasi Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu Triwulan 1 Tahun 2025	162
Tabel 131 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu	162
Tabel 132 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu	162
Tabel 133 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	164
Tabel 134 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	164
Tabel 135 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Tahun 2025	166
Tabel 136 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Indeks Kepuasan Masyarakat	166
Tabel 137 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Indeks Kepuasan Masyarakat	167
Tabel 138 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	168
Tabel 139 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	168
Tabel 140 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Triwulan 1 Tahun 2025	169
Tabel 141 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Nilai Pengelolaan Kearsipan	170
Tabel 142 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Nilai Pengelolaan Kearsipan	170
Tabel 143 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	171
Tabel 144 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	171
Tabel 145 realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja pada periode TW I tahun 2025	173
Tabel 146 Realisasi Anggaran untuk setiap Sasaran Strategis pada periode TW I tahun 2025	180
Tabel 147 Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat terhadap penilaian AKIP BPOM di Kediri Tahun 2024	195
Tabel 148 Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Kediri Triwulan I Tahun 2025	208

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis kesehatan dan pembangunan ekonomi, Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Balai POM di Kediri melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui evaluasi izin edar (pre-market) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan post-market dan sebaliknya.

Meningkatnya sektor usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hampir diseluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang seoptimal mungkin diseluruh wilayah Indonesia sehingga perlu dibentuk organisasi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memberikan daya ungkit bagi terpenuhinya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat.

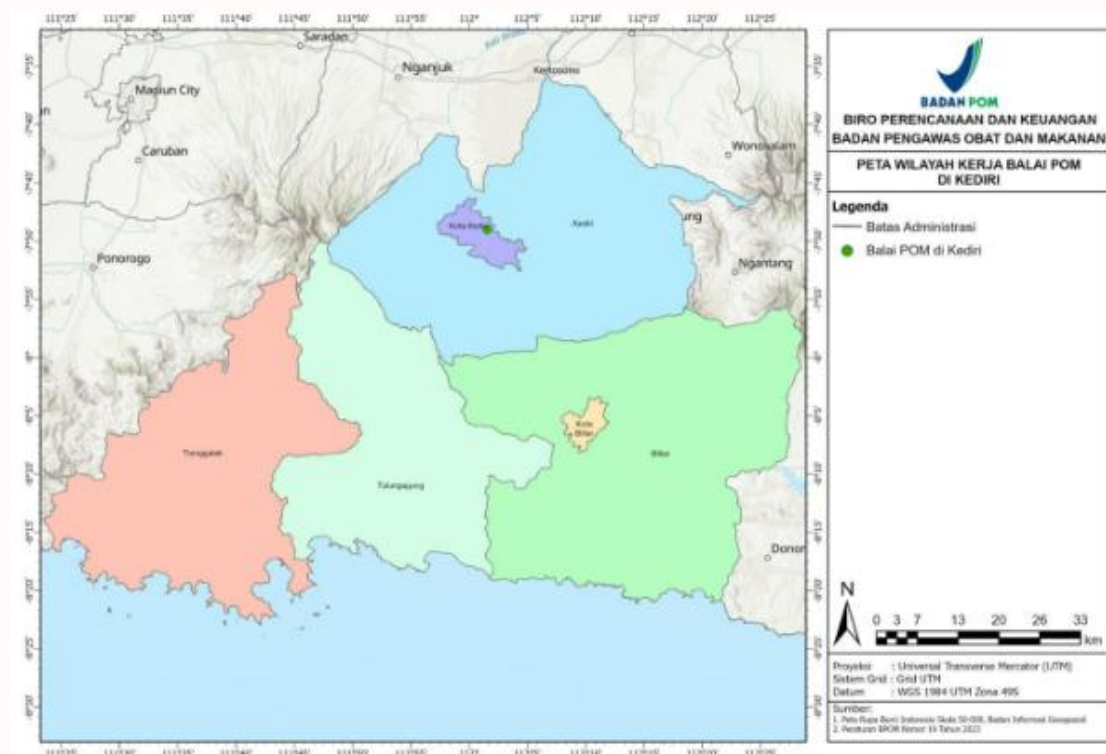
Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Kabupaten Kediri menyadari pentingnya perubahan paradigma ini juga disikapi dengan kebijakan penguatan kapasitas Balai POM di Kediri untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai POM di Kabupaten Kediri di tengah masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan

keamanan, manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 3 (tiga) UPT yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Balai POM di Kediri dan Balai POM di Jember dengan total wilayah kerja terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Adapun wilayah kerja Balai POM di Kediri, mencakup 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar dengan luas wilayah 5.021,37 km² dan jumlah penduduk 5.265.100 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri/BPS-Statistics Jawa Timur Province and Ministry of Home Affairs).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Begitupun dengan Balai POM di Kediri yang bertugas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan baik di sarana produksi maupun di peredaran/ distribusi. Total sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ada di wilayah kerja Balai POM di Kediri 7912 sarana, hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Balai POM di Kediri untuk melindungi masyarakat dari produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan.



Gambar 1 Wilayah Kerja Balai POM di Kediri

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, cakupan wilayah kerja UPT Balai POM di Kediri yang luas terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa. Dari lokasi kantor Balai POM di Kediri menuju wilayah kerjanya dapat menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Trenggalek yaitu ± 4 jam perjalanan darat.

Tabel 1 Jarak Tempuh ke Wilayah Kerja

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	* Waktu Tempuh (jam)
1	Kabupaten Trenggalek	jam	4
2	Kabupaten Tulungagung	jam	3
3	Kabupaten Blitar	jam	3
4	Kabupaten Kediri	jam	2

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	* Waktu Tempuh (jam)
5	Kota Kediri	jam	0,5
6	Kota Blitar	jam	2

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kediri ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, yang secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Balai POM di Kediri mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai POM di Kediri menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- Menyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Melaksanakan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;

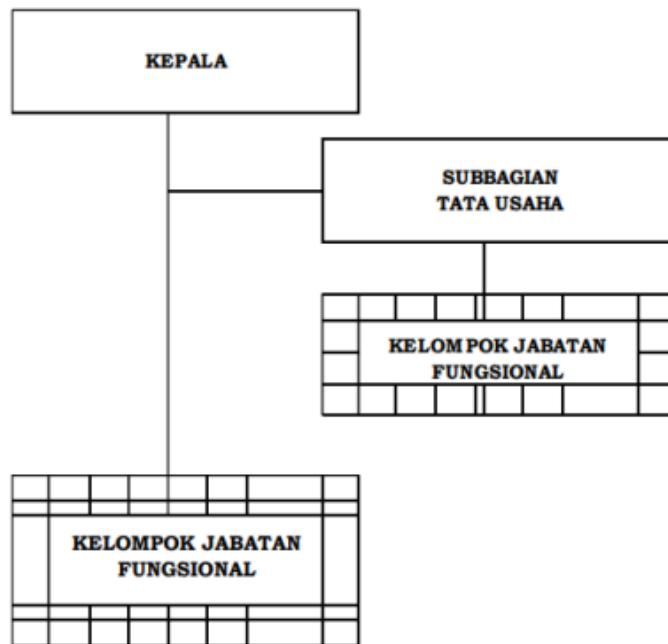
- Melaksanakan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, Balai POM di Kediri mempunyai 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *pasca* beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

1.3 Struktur Organisasi

Balai POM sebagai salah satu UPT BPOM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, terdiri atas tiga Komponen utama yaitu Kepala, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional:



Gambar 2 Struktur Organisasi UPT BPOM

- **Kepala Balai POM**
Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023, bahwa seluruh UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai POM di Kediri dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu
- **Kelompok Jabatan Fungsional**
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 1 tahun 2023, jabatan fungsional adalah sekumpulan jabatan yang memiliki fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional. Pelayanan fungsional ini didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di Balai POM Kediri antara lain:
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - c. Jabatan Fungsional Pengelola APBN
 - d. Jabatan Fungsional SDM Aparatur

Pada tahun 2025, terdapat 6 (enam) tim kerja di Balai POM di Kediri, yakni:

1. Tim Kerja Pemeriksaan/Inspeksi;
2. Tim Kerja Sertifikasi;
3. Tim Kerja Infokom;
4. Tim Kerja Penindakan;
5. Tim Kerja Pengujian;
6. Tim Kerja Tata Usaha.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, jumlah pegawai di Balai POM di Kediri sebanyak 39 (tiga puluh tujuh) pegawai, dengan rincian 28 (dua puluh delapan) PNS, 3 (tiga) PPPK, dan 8 (delapan) outsourcing dan terdiri dari jabatan struktural, fungsional dan pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jabatan Struktural

- Kepala Balai POM di Kediri;
- Kepala Subbagian Tata Usaha

2. Jabatan Fungsional

- Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, 6 (enam) pegawai;
- Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama 16 (enam belas) pegawai;
- Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir 1 (satu) pegawai;
- Pranata SDM Aparatur Mahir 1 (satu) pegawai;
- Pranata Komputer Terampil 1 (satu) pegawai;
- Pranata Keuangan APBN Terampil 1 (satu) pegawai;
- Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda 1 (satu) pegawai

3. Jabatan Pelaksana

- Penata Layanan Operasional 1 (satu) pegawai;
- Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1 (satu) pegawai

4. Pegawai kontrak (outsourcing)

- Front Office 1 (satu) pegawai;
- Arsiparis 1 (satu) pegawai;
- Tenaga keamanan 3 (tiga) pegawai;
- Pengemudi 1 (satu) pegawai;
- Tenaga kebersihan 2 (dua) pegawai.

1.4 Isu Strategis (Aspek Strategis Organisasi)

1. Isu Strategis Internal

- a. Sumber Daya Manusia Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Balai POM di Kediri

SDM yang dimiliki Balai POM di Kediri sampai dengan awal tahun 2025 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan maka jumlah SDM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah serta belum dapat mewujudkan pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Kediri senantiasa melakukan peningkatan kompetensi SDM dan merencanakan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Kediri perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Balai POM di Kediri juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Gap kompetensi unit kerja tidak menggambarkan nilai/capaian kompetensi pegawai secara individu karena nilai/capaian unit merupakan gabungan standar dan capaian individu. Kemungkinan besar, kekurangan kompetensi pegawai yang berada di bawah standar dapat diimbangi oleh nilai kompetensi pegawai yang memenuhi standar. Oleh Karena itu, pengembangan kompetensi individu harus tetap berlandaskan pada hasil penilaian kompetensi masing-masing, sehingga diperlukan pengaturan peningkatan kompetensi yang terfokus dan berkelanjutan, sesuai dengan peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Pemerataan kompetensi di semua bidang untuk meminimalkan kesenjangan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha.

Peningkatan kompetensi di bidang Teknologi Informasi harus terus diperbaharui, mengingat semakin berkembangnya penggunaan media online saat ini. Penggunaan aplikasi yang dapat mendukung dalam kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, memberikan pelayanan publik, memberikan bimbingan kepada pelaku usaha, serta mempermudah komunikasi dan pengumpulan data yang diperlukan oleh instansi terkait.

b. Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemen Mutu dalam Upaya Pembangunan Zona Integritas

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah membentuk birokrasi pemerintah yang profesional, dengan ciri-ciri yang adaptif, berintegritas, memiliki kinerja tinggi, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, birokrasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik, bersifat netral, sejahtera, berdedikasi, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.

Pada tahun 2025, Balai POM di Kediri akan memulai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang tepat dan profesional, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang yang diberikan.

Balai POM di Kediri menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan yang berfokus kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. Penerapan QMS ISO 9001:2015 di Balai POM Kediri diintegrasikan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memperhatikan kesamaan dalam aspek pengendalian risiko. Secara konsisten, Balai POM di Kediri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sebagai bagian dari lembaga tersebut. Untuk mendukung perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam penerapan sistem manajemen mutu, dilakukan evaluasi melalui audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara rutin. Balai POM di Kediri berkomitmen untuk mencegah terjadinya praktik penyuapan dalam lingkungan organisasi dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pada tahun 2024, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah mulai diimplementasikan dengan pelaksanaan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk memahami dan menghindari potensi penyuapan, baik dalam interaksi dengan pihak internal maupun eksternal.

c. Pembangunan Gedung Balai POM di Kediri

Status kepemilikan tanah Kantor Balai POM di Kediri masih dalam status “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang

Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor Balai POM di Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 kemudian diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019 dan diperpanjang kembali sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/659/418.51/2021 dan Nomor: KS.01.01.1061.03.21.0024 dengan masa berlaku pinjam pakai selama 5 (lima) tahun. Balai POM di Kediri mendapatkan hibah tanah dari Pemkab Kediri sesuai sertifikat Hak Pakai Tanah dengan nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI nomor 12.25.000005908.0 dengan luas 6658 m²

d. Layanan Pengujian Balai POM di Kediri

Balai POM di Kediri bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.672841/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp 24.253.063.000,00 (Dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk tahun anggaran 2025. Anggaran pada output fungsi pengujian sebesar Rp 4.916.740.000,00 (Empat milyar Sembilan ratus enam belas jta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Anggaran ini direalisasikan untuk pengadaan alat laboratorium dan operasional pengujian rutin Balai POM di Kediri.

Laboratorium pengujian memegang peranan kunci dalam sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM, khususnya dalam mendeteksi dan memverifikasi kualitas serta keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat. Hasil pengujian yang cepat sangat dibutuhkan agar jika produk tidak memenuhi standar, dapat segera ditarik atau diambil tindakan lain untuk melindungi masyarakat dari obat yang tidak memenuhi kriteria atau yang palsu. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pengujian Balai POM di Kediri, termasuk pemenuhan standar peralatan laboratorium yang efektif dan efisien, kompetensi sumber daya manusia, serta ruang lingkup pengujian yang sesuai.

Sejak tahun 2018, Balai POM di Kediri belum memiliki laboratorium pengujian sendiri. Sebagai solusi sementara, sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diambil di wilayah kerja Balai POM Kediri dikirim untuk diuji di Balai Besar POM Surabaya. Ketidakersediaan laboratorium pengujian ini menyebabkan proses pengujian, baik untuk pengujian rutin, pengujian terkait kasus penindakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maupun pengujian untuk pihak ketiga atau pelaku usaha, menjadi kurang efisien dan memakan waktu lebih lama. Hingga pada tahun 2024, Balai POM Kediri mulai melakukan pembangunan sarana laboratorium.

2. Isu Strategis Eksternal

- a. Perkembangan perizinan melalui OSS RBA yang sangat dinamis

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri.

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat BPOM melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini. Penundaan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk obat dan pangan olahan yang dibutuhkan dan dapat mengurangi daya saing industri. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada perbaikan efisiensi dan transparansi proses registrasi, sekaligus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa BPOM di Kediri tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BPOM di Kediri.

Perizinan OSS RBA juga mengakomodasi kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga bersifat dinamis. Setiap perubahan yang terjadi dalam perizinan tersebut memerlukan waktu dalam adaptasi dan sosialisasi sehingga diperlukan komunikasi yang berkelanjutan antara pelaksana perizinan dan pelaku usaha.

- b. Kegiatan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian bersama dengan DPMPSTP dan Dinas Kesehatan belum tersinkronisasi dengan pemeriksaan rutin Balai POM di Kediri

Pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara efektif. Koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah dan Balai POM di Kediri telah dilaksanakan sepanjang tahun. Koordinasi terkait perencanaan dapat ditingkatkan

sehingga dapat memperkuat efektifitas dan efisiensi pengawasan. Balai POM di Kediri terlibat dalam pengawasan rutin sarana pelayanan kefarmasian bersama DPMPTSP dan Dinas Kesehatan di Kota Kediri. Target pengawasan sarana pelayanan kefarmasian bersama dengan DPMPTSP dan Dinas Kesehatan Kota Kediri dapat disinkronisasi dengan pemeriksaan rutin Balai POM di Kediri. Di wilayah lain seperti Kabupaten Trenggalek Balai POM di Kediri bekerjasama dalam asistensi dan advokasi pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Sementara intensifikasi pengawasan pangan olahan di seluruh wilayah kerja telah melibatkan pemangku kepentingan di pemerintahan daerah.

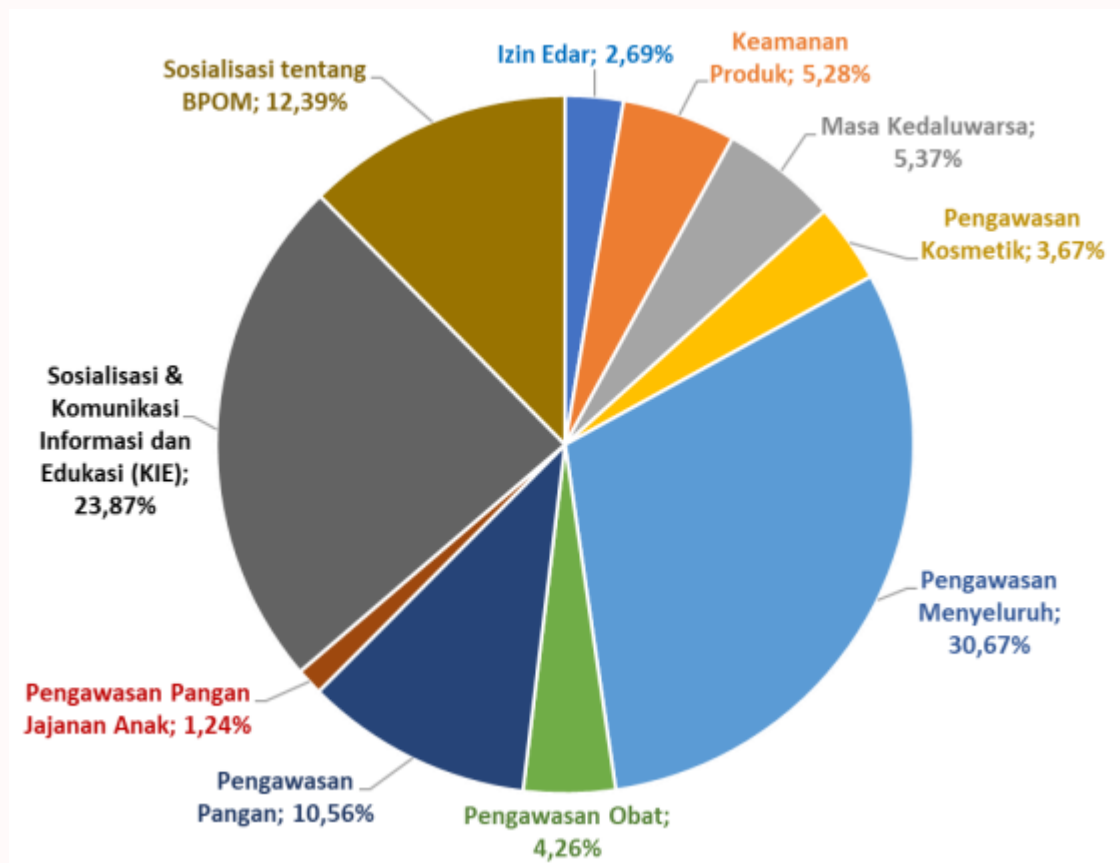
c. Harapan stakeholder dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi.

Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Badan POM menjangkau feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di seluruh Indonesia di 38 (tiga puluh delapan) provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis word cloud dari feedback dan saran masukan dari masyarakat. Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “kinerja BPOM”, “Pengawasan Produk”, dan “Sosialisasi BPOM ke Masyarakat”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah di klusterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.



Gambar 3 Chart Kinerja UPT

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah rural.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Secara khusus dalam bidang penindakan harapan dari *Criminal Justice System* yang menjadi mitra kerja sama Balai POM di Kediri adalah penindakan yang cepat terhadap tindak pidana pada Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Kediri bersama Bea Cukai juga diharapkan dapat bekerjasama dalam pengawasan pemasukan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Kediri juga diharapkan dapat berperan dalam organisasi profesi di daerah sehingga anggota organisasi memiliki pemahaman yang baik terkait regulasi di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pelaku usaha berharap mendapatkan informasi dan pelayanan terkait registrasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, masyarakat secara umum mendapatkan informasi dan pelayanan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan jurnalis mendapatkan liputan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

d. Keterbatasan UMKM dalam pemenuhan standar Cara Produksi yang Baik

Beberapa pelaku usaha yang dilakukan pendampingan sampai dengan terbitnya Sertifikat IP CPPOB tidak bersedia untuk diaudit. Hasil audit sarana tersebut sebagian besar TMK dan sarana tidak melanjutkan sampai dengan terbitnya Ijin Edar MD. Sepanjang tahun 2024 terdapat 41 (empat puluh satu) sarana yang mengajukan IP CPPOB dengan hasil 20 (dua puluh) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 21 (dua puluh satu) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Dari 21 (dua puluh satu) sarana TMK tersebut 2 (dua) di antaranya tidak melanjutkan dan tidak bersedia diaudit.

Beberapa hal yang menjadi sebabnya antara lain jenis pangan yang memang dapat didaftarkan dengan ijin PIRT, sarana yang tidak lancar dalam pemasaran, sarana kesulitan dalam proses perijinan dan sarana kesulitan dalam penyelesaian pembangunan tempat produksi yang sesuai dengan kaidah CPPOB. Sehingga solusinya perlu adanya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Seiring perubahan lingkungan strategis, Badan POM dituntut untuk terus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di seluruh wilayah kerja Indonesia. Rencana kinerja Balai POM di Kediri kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029. Renstra Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Balai POM Di Kediri diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk kontribusi Balai POM di Kediri terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Balai POM di Kediri sebagai bagian dari UPT BPOM memiliki Visi yang sama dengan Visi dari Badan POM. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu : “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai bagian dari UPT BPOM, Balai POM di Kediri memiliki misi yang sama dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Balai POM di Kediri, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
3. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
4. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
5. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM
6. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Sasaran strategis ini disusun sebagai upaya untuk mengimplementasikan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Kediri dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur ataupun peluang yang dimiliki Balai POM di Kediri. Dalam kurun waktu tahun 2025-2029 ke depan 31 diharapkan Balai POM di Kediri akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada kerangka logis kinerja (*logframe*) tahun 2025-2029 berikut:

No	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator	Tahun											
				2025			2026			2027			2028		
				Q1	Q2	RGS	Q1	Q2	RGS	Q1	Q2	RGS	Q1	Q2	RGS
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Penertasan sampel Sediaan Farmasi berisiko yang diidentifikasi sesuai ketentuan	75												
2		Penertasan sampel Pangan Olahan berisiko yang diidentifikasi sesuai ketentuan	77												
3		Penertasan sampel KLB bersumber pangan yang diidentifikasi sesuai ketentuan	79												
4		Penertasan sampel PIRT berisiko yang diidentifikasi sesuai ketentuan	81												
5		Penertasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diidentifikasi sesuai ketentuan	83												
6		Penertasan sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diidentifikasi sesuai ketentuan	85												
7		Penertasan sarana distribusi pangan olahan termasuk BTP yang diidentifikasi sesuai ketentuan	87												
8		Penertasan sarana produksi Sediaan Farmasi yang diidentifikasi sesuai ketentuan	89												
9		Penertasan sarana produksi pangan olahan termasuk BTP yang diidentifikasi sesuai ketentuan	91												
10		Penertasan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melakukan KIDISO	93												
11		Penertasan rekomendasi hasil pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diidentifikasi oleh stakeholder	95												
12		Penertasan cakupan sarana produksi pangan olahan yang diidentifikasi sesuai ketentuan	97												
13	Meningkatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Nilai rata-rata Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14,0				16,0			19,0			22,0		25,0
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	4				6			8			10		12
15		Jumlah edukasi yang dilaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1				2			3			4		5
16		Jumlah desa pangan aman berbasis komunitas	1				1			1			1		1
17	Meningkatnya efektivitas regulasi assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penertasan UMBG yang diidentifikasi sesuai ketentuan	91				91,5			92			92,5		93
18		Penertasan KIBERHASILAN yang diidentifikasi sesuai ketentuan	90				91			92			93		94
19		Penertasan KIBERHASILAN yang diidentifikasi sesuai ketentuan	90				91			92			93		94
20		Penertasan KIBERHASILAN yang diidentifikasi sesuai ketentuan	90				91			92			93		94
21	Layanan Publik yang Prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
22		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
23		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
24		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
25		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
26		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
27		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
28		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
29		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
30		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
31		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
32		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
33		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
34		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
35		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
36		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
37		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
38		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
39		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79
40		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51				4,58			4,65			4,72		4,79

Gambar 4 Renstra 2025 - 2029

Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 beserta dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dimana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.
2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses

pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.
4. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta mengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.
5. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.
6. Layanan Publik BPOM yang Prima: Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
7. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif: Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SS
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu 3. Persentase PIRT yang aman dan bermutu 4. Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SS
			6. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Memfasilitasi percepatan pengembangan	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM
dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan	saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan	1. Persentase inovasi sediaan farmasi dan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SS
keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	pangan olahan yang dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan 3. Tingkat Kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM)
Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
Pengelolaan pemerintahan yang	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, <i>Agile</i> ,	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang	Indeks RB BPOM

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SS
bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	berintegritas dan adaptif	

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran BPOM di Kediri pada tahun 2025 yang selaras antara Renstra 2025-2029 dengan penyusunan anggaran serta berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan POM, maka Kepala BPOM di Kediri menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kediri Nomor HK.02.02.19B.19B5.09.24.142 Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	pengawasan oleh lintas sektor	Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	78,79
		Nilai AKIP UPT BPOM	78,18
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,13
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Kediri menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Kediri tahun 2025-2029 dan DIPA Balai POM di Kediri Tahun Anggaran 2025.

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Target pada RKT Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Kediri tahun 2025-2029. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri tahun 2025 terdiri atas 9 Sasaran Kegiatan yang diuraikan menjadi 25 Indikator Kinerja Kegiatan dengan pengusulan target sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2025.

Jumlah anggaran DIPA Balai POM di Kediri tahun 2025 sebesar Rp 24.253.063.000,- (Dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah). Anggaran pada Balai POM di Kediri mengalami efisiensi sesuai menjadi Rp 9.005.252.000,- (Sembilan milyar lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya bersumber pada Rupiah Murni (RM).

Berdasarkan anggaran tersebut di atas maka disusunlah Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Kediri, sebagai berikut :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Indikator
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81,75
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	98
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Indikator
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87,97
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,37
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		16	Jumlah desa pangan aman	1
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Indikator
	bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif			
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	78,55
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Selain Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, berdasarkan Surat dari Sestama nomor B-KP.09.01.2.01.25.67 tanggal 30 Januari 2025, Balai POM di Kediri mendapatkan tambahan 6 (enam) Direktif Penugasan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri
2. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
5. Meningkatnya koordinasi efektifitas dalam program sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik BPOM

Keenam Direktif Penugasan tersebut diatas diukur keberhasilannya di akhir tahun dan digunakan sebagai bagian dari tolok ukur kinerja Balai POM di Kediri.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BPOM di Kediri sebagai unit kerja wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BPOM di Kediri) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan

kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi SIMETRIS *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Triwulanan				Anggaran (Rupiah)
				I	II	III	IV	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81.75	81.75	81.75	81.75	74.726.000
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO				26	44.850.000
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75	75	75	26.748.000
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	4.458.000
		5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75	75	75	13.374.000
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	89	92	95	98	50.910.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Triwulanan				Anggaran (Rupiah)
				I	II	III	IV	
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	93	93	93	26.941.500
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	26.941.500
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	92.25	92.25	92.25	65.610.000
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	28.950.000
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87.97	87.97	87.97	87.97	5.783.000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	58	61	64	67	16.071.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Triwulanan				Anggaran (Rupiah)
				I	II	III	IV	
	Pangan Fortifikasi							
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8	10	12	14	4.916.740.000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84,37	84,37	84,37	84,37	92.759.000
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	5%	25%	70%	4	142.333.000
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	5%	35%	70%	4	126.918.000
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	5%	60%	100%	1	76.318.000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik	15	50	75	91	18.875.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Triwulanan				Anggaran (Rupiah)
				I	II	III	IV	
			Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan					
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	61	71	71	82	221.754.000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50	50	90	50.200.000
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT				4,2	84.350.000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM				75,00	15.558.203.00 0
		23	Nilai AKIP UPT BPOM				78,55	169.320.000
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5.0	3.695.890.000

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Triwulanan				Anggaran (Rupiah)
			I	II	III	IV	
Organisasi yang optimal	25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				3	44.692.000

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Pada tahun 2025 kategori capaian indikator kinerja menggunakan Pedoman SAKIP di Lingkungan Badan POM. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan POM, capaian indikator kinerja dalam laporan ini dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 5 Kriteria Pencapaian Indikator Tahun 2025

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	$>120\%$	
Sangat baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$= 100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$< 70\%$	

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk :

1. Sebagai revidi dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan BPOM No. 83 tahun 2025, nilai Sasaran Strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

Contoh perhitungan NP sebagai berikut :

$$NP = \Sigma NSS / \Sigma SS$$

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
Stakeholder	90
SS1	90
Internal Process	(100+90+85+90)/4 = 91,25
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
Learning and Growth	(75+80+60)/3 = 71,67
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (n/a), maka SS tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Keterangan :

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif

Contoh Perhitungan NPSS :

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
Stakeholder	90
SS1	90
Internal Process	$(100+90+85+90)/4 = 91,25$
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
Learning and Growth	$(75+80+60)/3 = 71,67$
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60
NPSS	$(90+91,25+71,67)/3 = 84,30$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Balai POM di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data kinerja Balai POM di Kediri yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.
2. Kepala Balai POM di Kediri menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Kediri (Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja).
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai POM, verifikasi data juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan.
4. Apabila terjadi kesalahan data, penanggungjawab data di setiap bidang dapat menyampaikan perbaikan data kepada penanggungjawab data Balai POM di Kediri
5. Dilakukan verifikasi data, rapat bulanan untuk monitoring dan evaluasi setiap bulan, dan dilakukan konfirmasi data pada saat rapat bulanan.
6. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi e-monev Bappenas dan aplikasi SIMETRIS e-performance.
7. Data kinerja setiap bulan yang telah direkap dan diverifikasi akan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kediri untuk diupload pada bit.ly/capaianUPTtahun2025.
8. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah

dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

9. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis di Balai POM di Kediri, hal ini penting dilakukan untuk membantu organisasi mengevaluasi, mengidentifikasi efisiensi, efektifitas kegiatan, area keberhasilan dan potensi perbaikan atau penyesuaian dalam strategi demi mencapai tujuan organisasi. Capaian kinerja selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, membandingkan realisasi triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 dan membandingkan realisasi triwulan I tahun 2025 dengan realisasi triwulan I tahun lalu. Dalam melakukan analisis, disampaikan penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja, upaya perbaikan atau rekomendasi, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta tindak lanjut rekomendasi sebelumnya.

Capaian kinerja Balai POM di Kediri diukur secara kuantitatif melalui Nilai Pencapaian Sasaran Kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja. Berikut Nilai Pencapaian Sasaran Kinerja Sampai Triwulan I 2025 Nilai Kinerja Organisasi dari Balai POM di Kediri.

Tabel 6 Pencapaian Nilai Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	% CAPAIAN TRIWULAN I	NORMALISASI CAPAIAN PK
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	107,10	107.10
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	11,5	11,5
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	122,88	110
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101,64	101,64

NO	SASARAN KINERJA	% CAPAIAN TRIWULAN I	NORMALISASI CAPAIAN PK
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100	100
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	81,97	81,97
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	83,32	83,32
8	Layanan Publik UPT yang prima	Diukur akhir tahun	
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Diukur akhir tahun	
Total Capaian PK			= 595,53
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata capaian PK)			= 595,53/7 = 85,08%
Predikat NKO			Baik

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 9 Sasaran Kinerja Balai POM di Kediri Tahun 2025, terdapat 1 Sasaran Kinerja memperoleh predikat **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** ($> 110\%$), 2 Sasaran Kinerja memperoleh kriteria **SANGAT BAIK** (capaian $100\% < x \leq 110\%$), 1 Sasaran Kinerja memperoleh kriteria **BAIK** (capaian $90 < x \leq 100\%$), 2 Sasaran Kriteria memperoleh kriteria **CUKUP** (capaian $60 < x \leq 90\%$), 1 Sasaran memperoleh predikat **KURANG** ($< 60\%$) dan 2 Sasaran Kinerja diukur di akhir tahun. Berdasarkan hasil capaian tersebut maka Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPOM di Kediri Triwulan I 2025 adalah sebesar 85,08% kategori **BAIK**.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, 25 Indikator Kinerja Utama diperjanjikan untuk mendukung 9 Sasaran Kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025

Pada bagian ini dijabarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 7 Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN 1 TAHUN 2025			KRITERIA
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
SK.1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81,75	100	122,32	Tidak dapat disimpulkan
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Diukur Akhir Tahun			
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	80	106,67	Sangat Baik
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	Baik
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	100	133,33	Tidak dapat disimpulkan
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	89	85	95,51	Baik
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	100	107,53	Sangat Baik
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	100	125%	Tidak dapat disimpulkan
9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,25	100	108,40	Sangat Baik
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	93	116,25	Tidak dapat disimpulkan
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87,97	99,37	112,96	Tidak Dapat Disimpulkan
SK.2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					

NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN 1 TAHUN 2025			KRITERIA
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	58	6,67	11,50	Kurang
SK.3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8	9,83	122,88	Tidak Dapat Disimpulkan
SK.4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84,37	89,92	106,58	Sangat Baik
15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	5	5	100	Baik
16	Jumlah Desa Pangan Aman	5	5	100	Baik
17	Jumlah Pasar Aman Pangan berbasis Komunitas	5	5	100	Baik
SK.5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	15	15	100	Baik
SK.6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	61	50	81,97	Cukup
SK.7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	41,66	83,32	Cukup
SK.8. Layanan Publik UPT yang prima					
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Diukur Akhir Tahun			

NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN 1 TAHUN 2025			KRITERIA
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
SK.9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal					
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Diukur Akhir Tahun			
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Diukur Akhir Tahun			
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Diukur Akhir Tahun			
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Diukur Akhir Tahun			

2. Perbandingan antara target tahunan 2025 dengan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel Perbandingan target tahunan 2025 dengan realisasi kinerja Triwulan I 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
SK.1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81,75	100	122,32 	Tercapai/ Melampaui
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	0	0 	Perlu Upaya keras
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	80	133,33 	Tercapai/ Melampaui
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100 	Akan Tercapai
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	100	133,33 	Tercapai/ Melampaui
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	98	85	86,73 	Akan Tercapai
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	100	107,53 	Tercapai/ Melampaui

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	100	125 	Tercapai/ Melampaui
9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,25	100	108,40 	Tercapai/ Melampaui
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	93	116,25 	Tercapai/ Melampaui
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87,97	99,37	112,96 	Tercapai/ Melampaui
SK.2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67	6,67	9,96 	Perlu Upaya Keras
SK.3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	9,83	70,21 	Akan Tercapai
SK.4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84,37	89,92	106,583 	Tercapai/ Melampaui
15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100	5	5 	Perlu Upaya Keras
16	Jumlah Desa Pangan Aman	100	5	5 	Perlu Upaya Keras
17	Jumlah Pasar Aman Pangan berbasis Komunitas	100	5	5 	Perlu Upaya Keras
SK.5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam,	91	15	16,48 	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
	Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan				
SK.6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	82	50	60,98 ▼	Perlu Upaya keras
SK.7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	55,56 ▼	Perlu Upaya keras
SK.8. Layanan Publik UPT yang prima					
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	0	0 ▼	Perlu Upaya keras
SK.9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal					
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	0	0 ▼	Perlu Upaya keras
23	Nilai AKIP UPT BPOM	78,55	0	0 ▼	Perlu Upaya keras
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0 ▼	Perlu Upaya keras
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	0	0 ▼	Perlu Upaya keras

3. Perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025 dengan realisasi Triwulan I tahun 2024

Tabel 8. Perbandingan capaian kinerja Triwulan I 2024 dengan capaian kinerja Triwulan I 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	PERSEN CAPAIAN TRIWULAN I			KETERANGAN
		2024	2025		
SK.1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	122,32	-	IKU Baru

NO	INDIKATOR KINERJA	PERSEN CAPAIAN TRIWULAN I			KETERANGAN
		2024	2025		
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	Diukur Akhir Tahun		IKU Baru
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	106,67	-	IKU Baru
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	-	100	-	IKU Baru
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	133,33	-	IKU Baru
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	95,59	95,51		-
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	107,53	-	IKU Baru
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	61,23	125		
9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	108,40	-	IKU Baru
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	116,25	-	IKU Baru
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	-	112,96	-	IKU Baru
SK.2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	11,5	-	IKU Baru
SK.3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					

NO	INDIKATOR KINERJA	PERSEN CAPAIAN TRIWULAN I			KETERANGAN
		2024	2025		
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	122,88	-	Tahun 2024 diukur tahunan
SK.4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	100,57	106,58		
15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	-	100	-	Tahun 2024 diukur mulai TW II
16	Jumlah Desa Pangan Aman	-	100	-	Tahun 2024 diukur mulai TW II
17	Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	-	100	-	Tahun 2024 diukur mulai TW II
SK.5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	100	100	-	Capaian TW I 2025 = Capaian TW 1 2024
SK.6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	90,3	81,97		
SK.7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	-	83,33	-	IKU Baru
SK.8. Layanan Publik UPT yang prima					
21	Indeks Pelayanan Publik UPT		Diukur Akhir Tahun		
SK.9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal					

NO	INDIKATOR KINERJA	PERSEN CAPAIAN TRIWULAN I			KETERANGAN
		2024	2025		
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		Diukur Akhir Tahun		
23	Nilai AKIP UPT BPOM		Diukur Akhir Tahun		
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		Diukur Akhir Tahun		
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		Diukur Akhir Tahun		

SASARAN STRATEGIS 1**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KEDIRI****IK 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan****a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025***Tabel 9 Perbandingan target dan realisasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan 1 tahun 2025*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75 %	100 %	122,32 %	Tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025*Tabel 10 Perbandingan target tahunan dan realisasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan triwulan I tahun 2025*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75 %	100 %	122,32 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024*Tabel 11 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024				
	2025	81,75 %	100 %	122,32 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% = \frac{(A+B+C+D)}{4} \times 100\%$$

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan 14 sampel sediaan farmasi terdiri dari 3 sampel obat, 1 sampel obat bahan alam, 1 sampel suplemen kesehatan, dan 9 sampel kosmetik. Sampel dilakukan tindak lanjut berupa kesesuaian perencanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan pengujian, kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, dan kesesuaian pelaporan monitoring / tanggapan atas surat dari pusat. Capaian persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **Tercapai/Melampaui** target yaitu 122,32% dengan kriteria “**Tidak dapat disimpulkan**”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 122,32% (Tidak dapat disimpulkan). Realisasi ini diperoleh dengan cara melaporkan kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi menggunakan *tools self assesment* yang disediakan oleh pusat. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan sejak perencanaan sampling sampai dengan pelaporan sampling. Setiap tahapan dilakukan perhitungan yang menitikberatkan pada kesesuaian baik itu kesesuaian jumlah perencanaan sampling dengan realisasi sampling, kesesuaian rencana pelaksanaan

sampling dan realisasi pelaksanaan (timeline), kesesuaian sampel dengan parameter ujinya, dan kesesuaian/ketepatan waktu pelaporan (timeline) hasil sampling dan ujinya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pelaksanaan sampling dan pengujian obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan rencana pelaksanaan (Renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 1 dan Kedeputian 2 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling serta koordinasi melalui grup percakapan antara BPOM pusat dengan UPT BPOM. Terdapat pula komunikasi yang baik antara petugas Balai POM di Kediri dengan Balai Penguji yang tergabung dalam Regionalisasi laboratorium. antar UPT BPOM baik itu Loka POM, Balai POM dan Balai Besar POM terdapat grup *whatsapp* yang memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait sampling dan pengujian secara regionalisasi laboratorium mengingat sampling memiliki proses bisnis yang cukup kompleks karena mempertimbangkan banyak variabel aspek seperti aspek kemampuan laboratorium dalam menguji (ketersediaan metode analisis, alat, reagensia, dan sumber daya manusia), lokasi laboratorium Balai POM yang akan menguji (memerlukan pengiriman sampel) dan parameter uji tertentu yang harus dipertimbangkan (uji kimia, uji mikro, dan/atau zat aktif tertentu).

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 12 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 14.945.200	Rp. 2.907.700	19,46 %	122,32 %	5,29 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 5,29.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 13 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	-	-	-	-	-	-

Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 dan tidak terdapat pada tahun 2024, sehingga tidak ada rekomendasi tindak lanjut terhadap periode sebelumnya.

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2025 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan,
3. Pemenuhan timeline pengujian dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian timeline pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan,
4. Kegiatan Pengujian dilakukan sesuai dengan standar ISO 17025 untuk menjamin validitas hasil pengujian laboratorium,
5. Dilakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter spesifik di balai lain yang menjadi anggota region Surabaya pada program regionalisasi,
6. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS),

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dan untuk indikator ini dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik dapat mendorong pencapaian target tahun 2025.

IK 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 14 Perbandingan Target Dan Realisasi pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	0 %	0 %	0 %	Kurang

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 15 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	26 %	0 %	0 % 	Perlu upaya keras

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 16 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
	2024	-	-	-	Belum ada

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	2025	26 %	0 %	0 %	Kurang

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM :

$$= \frac{\text{jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM}}{\text{jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans}} \times 100\%$$

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan perhitungan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dibagi jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM. Indikator ini merupakan indikator yang baru pada tahun 2025.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Belum terdapat realisasi pada TW 1 2025. Berdasarkan RHPK capaian hanya dihitung pada bulan Desember.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada triwulan I 2025 dilakukan perencanaan yang meliputi pemilihan sarana yang menjadi sasaran KIE Farmakovigilans.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 17 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	Rp. 8.970.000,-	Rp. 0	0 %	0 %	- (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa belum ada serapan anggaran untuk indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO. Anggaran yang tersedia merupakan anggaran untuk pelaksanaan KIE Farmakovigilans pada fasilitas pelayanan kesehatan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 18 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Monitoring Pelaksanaan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO termasuk tahapan-tahapannya	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Belum dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	Sudah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO.
2. Monitoring Pelaksanaan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO adalah kurang dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan I ini memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

IK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 19 Perbandingan Target Dan Realisasi sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %	80 %	106,67 %	Sangat Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 20 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %	80 %	106,67 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 21 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024				
	2025	75 %	80 %	106,67 %	Sangat Baik

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% = (20\% A + 20\% B + 20\% C + 10\% D + 10\% E + 20\% F)$$

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Sampel ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan cara diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling. Pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- Kesesuaian target sampel UPT
- Kesesuaian parameter uji
- Ketepatan pengambilan Kesimpulan
- Ketepatan waktu pengambilan sampel
- Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Sampel ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya apabila terdapat sampel tanpa izin edar (TIE) maupun tidak memenuhi syarat (TMS).

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I diperoleh dari hasil pemeriksaan 4 sampel pangan olahan. Belum terdapat sampel TMS pada triwulan I sehingga evaluasinya dilakukan sampai tahapan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian. Capaian persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **Tercapai/Melampaui** target yaitu 106,67% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

- Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 106,67% (Sangat Baik). Realisasi ini diperoleh dengan cara melaporkan kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan menggunakan *tools self assesment* yang disediakan oleh pusat. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan sejak perencanaan sampling sampai dengan pelaporan sampling. Kesesuaian dan ketepatan pada pelaksanaan setiap tahapan menjadi komponen yang masuk ke dalam rumus perhitungan sehingga kedua hal tersebut harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mencapai target yang ditetapkan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan (Renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 3 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling serta koordinasi melalui grup percakapan antara BPOM pusat dengan UPT BPOM. Terdapat pula komunikasi yang baik antara petugas Balai POM di Kediri dengan Balai Penguji yang tergabung dalam Regionalisasi laboratorium. antar UPT BPOM baik itu Loka POM, Balai POM dan Balai Besar POM terdapat grup *whatsapp* yang memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait sampling dan pengujian secara regionalisasi laboratorium mengingat sampling memiliki proses bisnis yang cukup kompleks karena mempertimbangkan banyak variabel aspek seperti aspek kemampuan laboratorium dalam menguji (ketersediaan metode analisis, alat, reagensia, dan sumber daya manusia), lokasi laboratorium Balai POM yang akan menguji (memerlukan pengiriman sampel) dan parameter uji tertentu yang harus dipertimbangkan (uji kimia, uji mikro, dan uji kajian).

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 22 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 5.349.600	Rp. 1.319.640	24,67 %	106,67 %	3,32 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 3,32.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 23 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

Indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 dan tidak terdapat pada tahun 2024, sehingga tidak ada rekomendasi tindak lanjut terhadap periode sebelumnya.

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2025 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,

2. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan,
3. Pemenuhan timeline pengujian dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian timeline pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan,
4. Kegiatan Pengujian dilakukan sesuai dengan standar ISO 17025 untuk menjamin validitas hasil pengujian laboratorium,
5. Dilakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter spesifik di balai lain yang menjadi anggota region Surabaya pada program regionalisasi,
6. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS),

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik dapat mendorong pencapaian target tahun 2025.

IK 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 24 Perbandingan Target Dan Realisasi sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Baik

Sehubungan dengan nota dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Perhitungan capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I dan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari

perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 25 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISAS I s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 26 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISAS I TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	2024				
	2025	100 %	100 %	100 %	Baik

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% = \frac{(30\% \times A1, A2 \dots An) + (35\% \times B1, B2 \dots Bn) + (35\% \times C1, C2 \dots Cn)}{n}$$

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L)

Sampel KLB diuji sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dilakukan perhitungan meliputi :

- A. Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%
- B. Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%
- C. Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I sebesar 100 % diperoleh dari pelaporan nihil kasus KLB keracunan pangan yang dilaporkan ke pusat. Pada triwulan I belum ada kasus KLB keracunan pangan yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Kediri. Pemantauan kasus KLB keracunan pangan pada aplikasi SPIMKER, grup percakapan KLB KP maupun laporan dari eksternal BPOM terus dilakukan dan memang belum ada laporan terkait kasus KLB keracunan pangan. Capaian persentase sampel sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 **Tercapai/Melampaui** target yaitu 100% dengan kriteria “**Baik**”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% (Baik). Realisasi ini diperoleh dengan cara membuat laporan kasus KLB keracunan pangan ke BPOM pusat meskipun nihil kejadian kasus KLB. Pelaporan kasus KLB keracunan pangan dibuat secara periodik setiap triwulan sebagai tindak lanjut atas ada/tidak nya kasus KLB. Laporan tersebut ditujukan pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sehingga Direktorat pangampu kegiatan ini mendapatkan laporan atas ada/tidak nya kejadian KLB keracunan pangan di masing-masing UPT.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar yaitu monitoring secara berkala aplikasi Sistem Pelaporan Masyarakat Keracunan (SPIMKer) dan koordinasi melalui grup percakapan antara BPOM pusat dan UPT terkait adanya kasus KLB keracunan pangan di setiap wilayah di Indonesia sehingga Balai POM di Kediri dapat secara cepat mendeteksi adanya laporan terkait kejadian KLB keracunan pangan di wilayah kerjanya. Koordinasi dan komunikasi yang baik terus dilakukan Balai POM di Kediri dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota di wilayah kerja untuk memantau apakah terjadi kasus KLB keracunan pangan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 27 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Rp. 891.600	Rp. 219.940	24,67 %	100 %	3,05 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 3,05.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 28 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Perlu dilakukan bimbingan	-	Koordinasi dengan Direktorat	TW II	Belum dilakukan koordinasi dengan	Direktorat pengampu memberikan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	teknis / <i>refreshment</i> kompetensi petugas terkait kasus KLB KP terkini		pengampu untuk mendapatka n Bimtek / <i>refreshment</i> terkait KLB KP terkini		Direktorat pengampu terkait pelaksanaan bimtek / <i>refreshment</i> untuk meningkatkan / menjaga kompetensi petugas	bimtek / <i>refreshment</i> untuk meningkatkan / menjaga kompetensi petugas.

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat pengampu terkait adanya kasus KLB KP, penanganan dan pelaporan kasus KLB KP di Balai POM Kediri,
2. Melakukan koordinasi dengan pengujian di Balai Besar POM di Surabaya apabila dalam penanganan kasus KLB KP memerlukan uji di Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar telah mencapai target dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian target berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik dapat mendorong pencapaian target tahun 2025.

IK 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025***Tabel 29 Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %	100 %	133,33 %	Tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025*Tabel 30 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %	100 %	133,33 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024*Tabel 31 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024				
	2025	75 %	100 %	133,33 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% = (20\% A + 20\% B + 20\% C + 10\% D + 10\% E + 20\% F)$$

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Sampel ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan cara diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling. Pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- A. Kesesuaian target sampel UPT
- B. Kesesuaian parameter uji
- C. Ketepatan pengambilan Kesimpulan
- D. Ketepatan waktu pengambilan sampel
- E. Ketepatan waktu pelaporan
- F. Sampel ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya apabila terdapat sampel tanpa izin edar (TIE) dan/atau rusak dan/atau kedaluwarsa dan/atau tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian.

Pada tahun 2025, kegiatan sampling seluruh sampel PIRT hanya dilakukan sampai dengan triwulan I saja. Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan 6 sampel PIRT. Pada saat sampling, terdapat 1 sampel PIRT tanpa izin edar (TIE) karena masa berlaku izinnya sudah habis dan pelaku usaha tidak melakukan perpanjangan izin. Sampel tersebut telah dilakukan tindak lanjut sesuai pedoman. Untuk 5 sampel PIRT lainnya dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling di laboratorium. Capaian persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **Tercapai/Melampaui** target yaitu 133,33% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 133,33% (Tidak dapat disimpulkan). Realisasi ini diperoleh dengan cara melaporkan kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan menggunakan *tools self assesment* yang disediakan oleh pusat. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan sejak perencanaan sampling sampai dengan pelaporan sampling. Kesesuaian dan ketepatan pada pelaksanaan setiap tahapan menjadi komponen yang masuk ke dalam rumus perhitungan sehingga kedua hal tersebut harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Untuk sampel yang memerlukan tindak lanjut dilakukan tindak lanjut oleh

UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan (Renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedeputan 3 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling serta koordinasi melalui grup percakapan antara BPOM pusat dengan UPT BPOM.

Balai POM di Kediri belum bisa melakukan pengujian secara mandiri sehingga pengujian dilakukan oleh Balai penguji dalam hal ini dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Komunikasi yang baik antara petugas Balai POM di Kediri dengan petugas Balai Besar POM di Surabaya melalui grup percakapan akan memudahkan koordinasi terkait sampling dan pengujian sehingga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 32 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 2.674.800	Rp. 659.820	24,67 %	133,33 %	4,41 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 4,41.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 33 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 dan tidak terdapat pada tahun 2024, sehingga tidak ada rekomendasi tindak lanjut terhadap periode sebelumnya.

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2025 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan,
3. Pemenuhan timeline pengujian dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian timeline pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan,
4. Kegiatan Pengujian dilakukan sesuai dengan standar ISO 17025 untuk menjamin validitas hasil pengujian laboratorium,
5. Dilakukan koordinasi terkait pengujian di Balai Besar POM di Surabaya,
6. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS),

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian target berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian

keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik dapat mendorong pencapaian target tahun 2025.

IK.6 Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 34 Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89 %	85 %	95,51 %	Cukup

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 35 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98 %	85 %	95,51 % 	Akan Tercapai

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 36 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	2024	85	85	100 %	Baik
	2025	98 %	85 %	95,51 %	Cukup

Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder :

$$= \frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan. Perhitungan pada tahun 2025 sedikit berbeda dengan

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat 6 dari 7 rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan tingginya persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat monitoring surat tindak lanjut dan surat masuk melalui Data Pemeriksaan oleh penanggungjawab masing-masing komoditi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 37 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rp. 10.182.000-	Rp. 0	0 %	95,51 %	- (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa belum ada serapan anggaran untuk indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Terdapat kebijakan efisiensi yang mempengaruhi serapan anggaran pada TW 1 secara keseluruhan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 38 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Monitoring Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Belum dilaksanakan Monitoring Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan	Sudah dilaksanakan Monitoring Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
	ditindaklanjuti oleh stakeholder				olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Monitoring Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.
2. Melakukan penyerapan anggaran sesuai perencanaan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah akan tercapai dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan I ini memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

IK 7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 39 Perbandingan Target Dan Realisasi Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93 %	100 %	107,53 %	Sangat Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 40 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93 %	100 %	107,53%	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 41 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2024	70 %	42,86 %	61,23 %	Cukup
	2025	93 %	100 %	107,53 %	Sangat Baik

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6
 - 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi : Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit), Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan dan Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari presentase capaian pemeriksaan sarana produksi dilakukan oleh Balai POM di Kediri, dengan hasil 100%. Capaian persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **Tercapai/Melampaui** target yaitu 107,52% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 107,52% (Sangat Baik).

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan evaluasi dan monitoring

tindak lanjut hasil pengawasan serta memonitoring CAPA (Tindakan Pencegahan dan Perbaikan) yang dilakukan oleh pelaku usaha.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan kartu kendali pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan target yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 1 dan Kedeputian 2 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan melakukan monitoring serta evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi serta monitoring CAPA pelaku usaha dalam memenuhi hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 42 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 5.388.300	Rp. 170.000	3,15 %	107,52 %	33,08 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 33,08 karena adanya Blokir anggaran di awal tahun sehingga ada pelaksanaan kegiatan yang tidak menyerap anggaran.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 43 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi melalui SIPT dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan serta CAPA	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi melalui SIPT kurang optimal	Sudah dilaksanakan Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi melalui SIPT serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan (Renlak) tahun 2025,
2. Penetapan target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi berdasarkan pembobotan faktor resiko hasil pemeriksaan tahun sebelumnya,
3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi agar sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan sarana produksi sediaan farmasi,
4. Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi ke SIPT agar tepat waktu,

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kategori Sangat Baik dan untuk

indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan I ini telah meningkatkan realisasi kinerja sebesar 107,52% jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar 88,61%.

IK 8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 44 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80 %	100 %	125 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Sehubungan dengan nota dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Perhitungan capaian Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I dan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 45 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80 %	100 %	125%	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 46 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2024	70 %	42,86 %	61,23 %	Cukup
	2025	80 %	100 %	125 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = **Rata-rata (A+B)**

D. Jumlah sarana diperiksa = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / Jumlah target) X 100%

E. Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Rata-rata (a+b+c)

a. Ketepatan waktu

b. Ketepatan tindak lanjut

c. Ketepatan koordinasi

Sarana produksi (Sarprod) Pangan Olahan yaitu meliputi : Sarana Produksi Pangan Olahan dan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari presentase capaian pemeriksaan sarana produksi dilakukan oleh Balai POM di Kediri, dengan hasil 100%. Capaian persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **Tercapai/Melampaui** target yaitu 125% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan yaitu 125% (Tidak Dapat Disimpulkan).

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan evaluasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan serta memonitoring CAPA (Tindakan Pencegahan dan Perbaikan) yang dilakukan oleh pelaku usaha.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan kartu kendali pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dan target yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 3 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dan melakukan monitoring serta evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi serta monitoring CAPA pelaku usaha dalam memenuhi hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 47 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 5.388.300	Rp. 170.000	3,15 %	125 %	38,62 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 38,62 karena adanya pemblokiran anggaran di awal tahun sehingga ada kegiatan yang tidak menyerap anggaran.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 48 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan melalui SIPT dan monitoring tindak lanjut hasil	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan melalui SIPT kurang optimal	Sudah dilaksanakan monitoring entry pemeriksaan sarana produksi pangan oahan melalui SIPT serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
	pemeriksaan serta CAPA					

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan (Renlak) tahun 2025,
2. Penetapan target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan berdasarkan pembobotan faktor resiko hasil pemeriksaan tahun sebelumnya,
3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi agar sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan sarana produksi Pangan Olahan,
4. Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi ke SIPT agar tepat waktu.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kategori Tidak dapat disimpulkan, dimana realisasi melebihi target periodik triwulan I. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan I ini telah meningkatkan capain kinerja sebesar 125%.

IK.9 Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 49 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa	92,25 %	100 %	108,40 %	Sangat Baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				

Sehubungan dengan nota dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Perhitungan capaian Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I dan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 50 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,25 %	100 %	108,40 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 51 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	68	79,17	116,42 %	Tidak dapat disimpulkan
	2025	92,25 %	100 %	108.40 %	Tercapai/ Melampaui

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

$$= \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$$

- . Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)
- . Pemenuhan Target Pemeriksaan
 - Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)
 - . Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%
 - A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan
 - b. Kesesuaian Tindaklanjuti
 - Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan
- . Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
 - . Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
 - a. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
 - b. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
 - c. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%
- A. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
 - . Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
 - a. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

- b. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.
- c. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan rata-rata dari persentase sarana distribusi obat, obat bahan alam dan kosmetika yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Definisi indikator pengawasan sarana distribusi pada tahun 2025 sedikit berbeda dengan indikator pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dikomparasikan secara langsung.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Seluruh komponen perhitungan indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan kegiatan yang dapat diintervensi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan ketentuan. Pemahaman petugas terhadap ketentuan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja indikator.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat monitoring kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan melalui Data Pemeriksaan yang membantu menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 52 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi	Rp. 13.122.00-	Rp. 860.000,-	6,55 %	100 %	15,54 (Tidak Efisien)

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan anggaran untuk indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masih sangat kecil menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas pada TW 1. Terdapat kebijakan efisiensi yang mempengaruhi serapan anggaran pada TW 1 secara keseluruhan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 53 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Monitoring Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Belum dilaksanakan Monitoring Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sudah dilaksanakan Monitoring Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Monitoring Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Melakukan penyegaran materi terkait ketentuan pemeriksaan dan tindak lanjut fasilitas distribusi sediaan farmasi

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator fasilitas distribusi sediaan farmasi adalah tercapai/melampaui dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan I ini memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

IK.10 Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 54 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %	93 %	116,25 %	Tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 55 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %	93 %	116,25 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 56 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	68	79,17	116,42 %	Tidak dapat disimpulkan
	2025	80 %	93%	116,25 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

$$= A + B + C \times 100\%$$

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan penjumlahan dari 3 (tiga) komponen yaitu jumlah sarana yang diperiksa, jumlah sarana yang ditindaklanjuti dan jumlah sarana yang dilaporkan tepat waktu. Definisi indikator pengawasan sarana distribusi pada tahun 2025 sedikit

berbeda dengan indikator pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dikomparasikan secara langsung.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Seluruh komponen perhitungan indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan kegiatan yang dapat diintervensi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan ketentuan. Pemahaman petugas terhadap ketentuan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja indikator.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat monitoring kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan melalui Data Pemeriksaan yang membantu menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 57 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 5.790.000,-	Rp. 860.000,-	14,85 %	116,25 %	6,83 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan anggaran untuk indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masih sangat kecil menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas pada TW1. Terdapat kebijakan efisiensi yang mempengaruhi serapan anggaran pada TW 1 secara keseluruhan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 58 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Monitoring Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Belum dilaksanakan Monitoring Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sudah dilaksanakan Monitoring Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Monitoring Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Melakukan penyegaran materi terkait ketentuan pemeriksaan dan tindak lanjut fasilitas distribusi pangan olahan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator fasilitas distribusi sediaan farmas pangan olahan adalah tercapai/melampaui dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk

perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan I ini memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

IK 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 59 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,97 %	99,37 %	112,96 %	Tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 60 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,97 %	99,37 %	112,96 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 61 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	2024	-	-	-	Tidak ada target
	2025	87,97 %	99,37 %	112,96 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = **Rata-rata (A+B+C+D)**

A. % Iklan Obat = Rata-rata (a+b)

- (Jumlah Iklan Obat yang diawasi / Jumlah target Iklan Obat yang diawasi) x 100%
- (Jumlah iklan obat yang dilaporkan tepat waktu/jumlah target iklan obat yang diawasi) x 100%

B. % Iklan Kosmetik = Rata-rata (a+b)

- Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Rata-rata ([Realisasi iklan di media online/target iklan di media online]x100%+[Realisasi iklan di media luar ruang/target iklan di media luar ruang]x100%+[Realisasi iklan di media elektronik/target iklan di media elektronik]x100%+[Realisasi iklan di media cetak/target iklan di media cetak]x100%)
- Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = Rata-rata (i+ii)
 - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / Jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / Jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. % Iklan OBA = Rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/jumlah target iklan yang diawasi)x100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/jumlah target iklan yang diawasi)x100%
- Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan)x100%

D. % Iklan SK = Rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

E. Iklan PO = (a+b)

- Pemenuhan Target Iklan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 40$
- Kesesuaian Proporsi Media Iklan = Rata-rata $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- Ketepatan waktu pelaporan iklan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Iklan Sediaan Farmasi yaitu meliputi : Iklan Obat, Obat bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Iklan Pangan Olahan meliputi Iklan Pangan Olahan dan Iklan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Kediri, dengan hasil 112,96%. Capaian persentase Iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **Tercapai/Melampaui** target yaitu 112,96% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 melewati target yang ditetapkan yaitu 112,96% (Tidak dapat disimpulkan).

Pelaksanaan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun,

kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan evaluasi dan monitoring entry data di SIPT.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Iklan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 3 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta melakukan monitoring serta evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan iklan serta monitoring entry data pengawasan iklan di SIPT.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 62 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Rp. 1.156.600,00	Rp. 428.000	37,1 %	112,96 %	2,05 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Iklan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 2,05 karena adanya pemblokiran anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak menyerap anggaran.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 63 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana	Timelin		

			Aksi	e		
1	Monitoring entry hasil pengawasan iklan melalui SIPT	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Monitoring entry pengawasan iklan melalui SIPT kurang optimal	Sudah dilaksanakan Monitoring entry pengawasan iklan melalui SIPT

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan (Renlak) tahun 2025,
2. Penetapan media pengawasan iklan sesuai target dari Kedeputan 1, 2 dan 3,
3. Monitoring entry hasil pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ke SIPT agar tepat waktu.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat masuk kategori Sangat Baik dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan sesuai dengan target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan I ini telah meningkatkan realisasi kinerja sebesar 112,96%

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

IK 12. Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 64 Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	58 %	6,67 %	11,50 %	Kurang

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 65 Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025 pada Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67 %	6,67 %	11,50%	 Perlu Upaya keras

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 66 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	2024	-	-	-	Tidak ada target
	2025	58%	6,67%	11,50 %	Kurang

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					

Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(\text{Jumlah sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa} / \text{Jumlah sarana produksi Pangan Fortifikasi yang ada}) \times 100\%$

Sarana produksi (Sarprod) Pangan Fortifikasi yaitu meliputi : Sarana Produksi Pangan jenis Tepung Terigu, Garam Beryodium dan Minyak Goreng. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Kediri dibagi dengan jumlah sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai POM Kediri, dengan hasil 11,50%. Capaian persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **Perlu Upaya keras** target yaitu 6,67% dengan kriteria “Kurang”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan yaitu 6,67% (Kurang).

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan evaluasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan serta memonitoring CAPA (Tindakan Pencegahan dan Perbaikan) yang dilakukan oleh pelaku usaha.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan sampling produk Pangan Fortifikasi yang dihasilkan oleh sarana produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan kartu kendali pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan target yang telah ditetapkan oleh Kedeputusan 3 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan melakukan monitoring serta evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi serta monitoring CAPA pelaku usaha dalam memenuhi hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 67 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Rp. 3.214.200	Rp. 600.000	18,67 %	9,95 %	-0,38 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar -0,38 karena adanya pemblokiran anggaran pada awal tahun sehingga ada kegiatan yang tidak menyerap anggaran.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 68 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui SIPT dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan serta CAPA	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui SIPT kurang optimal	Sudah dilaksanakan Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui SIPT serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan (Renlak) tahun 2025,
2. Penetapan target pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi berdasarkan pembobotan faktor resiko hasil pemeriksaan tahun sebelumnya,
3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi agar sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan sarana produksi Pangan Fortifikasi,
4. Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi ke SIPT agar tepat waktu.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat masuk kategori Sangat Baik dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan sesuai dengan target.

SASARAN STRATEGIS 3**MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN DI WILAYAH KERJA UPT****IK 13. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium****a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025**

Tabel 69 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8.00 %	9,83 %	122,88 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah dilakukan asesment oleh PPOMN dengan nilai capaian 122,90% dengan target di TW 1 8,00% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan data dukung yang digunakan untuk realisasi TW 1 merupakan baseline dari yang telah dicapai tahun 2024. Penentu nilai Standar Kemampuan Laboratorium terdiri dari Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Sedangkan pada tahun 2025, terdapat perubahan tools penilaian khususnya pada standar kompetensi laboratorium, sehingga mempengaruhi hasil penilaian standar kemampuan laboratorium menjadi lebih besar.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 70 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan	14 %	9,83 %	70,21 %	 Akan Tercapai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 71 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2024	0 %	0 %	0%	-
	2025	8 %	9,83 %	122,88 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium merupakan upaya Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/ Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan pada tahun 2025 TW I 9,83% dengan target TW I 8% sehingga capaian pada TW I 122,90%

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Fungsi Pengujian merupakan fungsi yang baru di BPOM Kediri sehingga masih terdapat kelebihan dan kekurangan, antara lain:

Kelebihan:

- Sudah terdapat laboratorium pengujian level 1 di Balai POM Kediri

Kekurangan:

- Terbatasnya instrumen/ alat laboratorium di Balai POM Kediri
- Terbatasnya ruang uji serta ruang instrumen di Balai POM Kediri
- Terbatasnya kemampuan kompetensi penguji di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kediri khususnya fungsi pengujian telah melakukan beberapa kegiatan atau program yang bertujuan untuk mendorong keberhasilan pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut diantaranya:

1. Memperbaiki sarana dan prasarana pada laboratorium.
2. Membuat usulan pengadaan alat sesuai dengan standar kemampuan laboratorium.
3. Membuat perencanaan pemenuhan kompetensi personel sesuai dengan standar kemampuan laboratorium.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 72 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp. 983.348.000	Rp. 710.063.080	72,21%	122,88%	0,70 (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah **Efisien**, dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,70

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 73 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Membuat Spesifikasi peralatan sesuai kebutuhan Standar Peralatan Laboratorium	Sesuai dengan rekomendasi	TW 2	Belum terdapat spesifikasi peralatan laboratorium	Sudah terdapat spesifikasi peralatan laboratorium
		Membuat Perencanaan Pelatihan untuk pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium	Sesuai dengan kebutuhan standar kompetensi laboratorium	TW 3	Belum adanya perencanaan kebutuhan kompetensi	Sudah adanya perencanaan kebutuhan kompetensi
		Melakukan perencanaan	Sesuai standar	TW 3	Belum dilakukan	Sudah dilakukan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		verifikasi metode untuk pemenuhan standar ruang lingkup pengujian	kemampuan laboratorium		verifikasi metode analisis	perencanaan verifikasi metode analisis

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemenuhan standar ruang lingkup sesuai dengan Standar Kebutuhan Laboratorium
2. Melaksanakan pemenuhan standar peralatan sesuai dengan Standar Kebutuhan Laboratorium
3. Melaksanakan pemenuhan kompetensi sesuai dengan Standar Kebutuhan Laboratorium

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium masuk kategori Sangat baik dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan I ini telah tercapai capaian kinerja 122,88%.

SASARAN STRATEGIS 4**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING - MASING WILAYAH KERJA BALAI POM DI KEDIRI****IK.14 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan****a. Perbandingan target triwulan I dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024***Tabel 74 Perbandingan target triwulan I dan realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I tahun 2024*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	84,37	89,92	106,58	Sangat Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025*Tabel 75 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	84,37	89,92	106,58 	Tercapai/ melampaui

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024*Tabel 76 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	2023	92 %	92,52 %	100,57%	Sangat baik
	2024	84,37 %	89,92 %	106,58%	Sangat baik

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- . Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;*
- . Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;*
- . Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;*
- . Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan*

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa wawancara tatap muka, penyebaran kuisioner, dan survei daring.

Kategori hasil penilaian indeks efektivitas KIE adalah:

<i>Skor indeks 100</i>	<i>Interpretasi Efektivitas</i>
<i><65,00</i>	<i>Kurang efektif</i>
<i>65,01 - 75,00</i>	<i>Cukup Efektif</i>
<i>75,01 - 85,00</i>	<i>Efektif</i>
<i>85,01 - 95</i>	<i>Sangat Efektif</i>
<i>95,01 - 100</i>	<i>Sangat Efektif Sekali</i>

Realisasi capaian tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan I pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan I pada tahun 2024. Perbedaan dalam realisasi Triwulan I pada tahun 2025 dan tahun 2024 disebabkan adanya perbedaan jumlah responden. Responden pada tahun 2024 sebanyak 103 responden dan pada tahun 2025 sebesar 47 responden. Selain jumlah responden, metode KIE pada tahun 2024 dan 2025 sedikit berbeda yaitu penggunaan media *online* dan *offline*.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Kegiatan KIE Balai POM di Kediri yang direncanakan pada triwulan I adalah KIE pada sosialisasi langsung dan melalui media sosial. Kegiatan penyebaran informasi secara sosialisasi langsung yang dilaksanakan pada triwulan meliputi kegiatan narasumber yang bekerjasama dengan stakeholder lain di wilayah Balai POM di Kediri.

Indeks efektivitas KIE pada triwulan I sebesar 89,92 merupakan komposit indeks pelaksanaan penyebaran informasi dan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial, dll.

Aspek ragam kegiatan dan minat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Bergerak dari hasil survei ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Balai POM di Kediri untuk melaksanakan KIE secara sistematis, beragam, dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering dan sesuai dengan latar belakang responden sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil survei tingkat efektifitas KIE telah memenuhi target sehingga perlu dilakukan upaya agar dapat semakin baik pada triwulan selanjutnya. Balai POM di Kediri harus meningkatkan kualitas dan menambah intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring/luring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan melibatkan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Balai POM di Kediri tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu Balai POM di Kediri sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh Balai POM di Kediri akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjaring minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 77 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Rp. 18.551.800	Rp. 3.014.000	16,25	106,58%	5,56 (Tidak Efisien)
--	-------------------	------------------	-------	---------	-------------------------

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan adalah Tidak Efisien dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 5,56.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan presentase capaian pada triwulan I tahun 2025 mendapatkan kriteria sangat baik dan kriteria efisiensi anggaran mendapatkan kriteria efisien, dapat disimpulkan untuk indikator ini telah memenuhi target. Berdasarkan hasil realisasi dan presentase capaian indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 78 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1.	Melakukan analisis kebutuhan masyarakat akan media informasi yang diminati	-	Sesuai rekomen dasi	TW 4	belum ada hasil Analisis kebutuhan masyarakat akan informasi yang diminati	sudah ada hasil Analisis kebutuhan masyarakat akan informasi yang diminati
2.	Melakukan penyebaran informasi/publikasi di media yang belum	-	Pembuatan video edukasi tentang obat dan	TW 4	belum ada pembuatan video edukasi tentang	sudah ada pembuatan video edukasi tentang

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
	pernah dilakukan		makanan		obat dan makanan	obat dan makanan

IK.15 Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman

a. Perbandingan target triwulan I dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 79 Perbandingan target triwulan I dan realisasi Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman sampai dengan triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Tahapan program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman yang telah dijalankan	5 %	5 %	100 %	Baik

b. Perbandingan target tahunan 2024 dan realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2024

Tabel 80 Perbandingan target tahunan 2024 dan realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2024 pada Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Tahapan program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman yang telah dijalankan	4 sekolah (100 %)	5 %	5 %	Perlu Upaya Keras 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 81 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
Tahapan program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman yang telah dijalankan	2024	0 %	0 %	0	-
	2025	5 %	5 %	100	Baik

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2024 adalah lebih tinggi yaitu 100 %.

PJAS merupakan kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah dan komunitas sekolah memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan jajanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa, dan 6 sekolah di wilayah Kabupaten Trenggalek. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Kediri untuk pertama kali. Balai POM di Kediri akan melakukan intervensi dan pendampingan terhadap komunitas yang ada di pasar, desa, dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan

pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, dll.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survei pasar, desa, dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah, dan pasar. Pada saat bimtek, kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana terhadap bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamin B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, kader akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim Balai POM di Kediri. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan *rapid test*. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes.

Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka, terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain. Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 6 sekolah. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas Balai POM Kediri. Dalam rangkaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman dilakukan sampling dan pengujian pangan

jajanan anak sekolah yang disediakan di kantin maupun penjaja PJAS di sekitar sekolah. Sampling dilakukan terhadap pangan jajanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rodhamin B dan Methanil yellow. Pengujian dilakukan menggunakan *Test Kit* Bahan Berbahaya. Diharapkan terjadi penurunan persentasi pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya sesudah intervensi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawalan keamanan pangan di sekolah dapat terlaksana lebih baik serta memiliki keberlanjutan hingga tahun-tahun berikutnya dan menyebar ke sekolah lainnya antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mendorong agar pemerintah daerah dan dinas terkait memasukkan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran pendidikan dan melakukan replikasi kegiatan.
- Mendorong pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk memasukan kegiatan keamanan pangan dalam kegiatan lain yang telah dilaksanakan di sekolah (sinergitas kegiatan keamanan pangan dengan kegiatan lain).
- Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawalan keamanan pangan di sekolah.
- Membuat kegiatan sebagai tindak lanjut kegiatan pangan jajanan anak sekolah aman
- Melakukan pengolahan data hasil kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan dan memperhatikan batas waktu pelaporan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 82 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp. 28.466.600	Rp. 0	0 %	0	- (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Sehingga tingkat efisiensi dari pada indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan adalah kinerja **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi tidak dapat diukur.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan presentase capaian pada triwulan I tahun 2025 mendapatkan kriteria sangat baik dan kriteria efisiensi anggaran mendapatkan kriteria tidak efisien, namun belum dapat disimpulkan apakah indikator ini telah memenuhi target/belum, karena indikator ini bersifat kumulatif. Berdasarkan hasil realisasi dan presentase capaian indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 83 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelime		
1.	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait	Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek melaksanakan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah	-	-	Belum ada koordinasi pelaksanaan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek	Sudah ada koordinasi pelaksanaan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek

IK 16. Jumlah Desa Pangan Aman

I. Jumlah Desa Pangan Aman

- Perbandingan Target TW I dengan realisasi samapai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 84 Perbandingan Target TW I dengan realisasi Jumlah Desa Pangan Amansampai dengan triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Desa Pangan Aman	5 %	5 %	100 %	Baik

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi samapai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 85 Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi samapai dengan triwulan I tahun 2025 pada Jumlah Desa Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Desa Pangan Aman	1 Desa (100 %)	5 %	5 %	Perlu Upaya Keras 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2025

Tabel 86 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2025 pada Jumlah Desa Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Desa Pangan Aman	2024	0	0	0	-
	2025	5%	5%	100%	Baik

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid 19. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa. Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan : advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, pengadaan paket informasi, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Target Desa Pangan Aman tahun 2025 adalah 1 desa, Realisasi Jumlah desa pangan aman di TW I belum dapat dihitung capainnya karena proses pelaksanaannya akan dihitung capainnya di akhir tahun 2025, namun realisasi tahapan desa pangan aman di TW I 2025 sudah dapat dihitung sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 5% dari target yang direncanakan di TW I sebesar 5% sehingga capaian yang diperoleh 100,0% (baik).

- d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi Jumlah desa pangan aman pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dihitung capaiannya dikarenakan tahapan pelaksanaan desa pangan aman baru mulai dilaksanakan di bulan April 2025 dan akan dihitung capaiannya pada akhir tahun 2025. Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 4 sekolah yang tersebar di Kabupaten Trenggalek. Program desa pangan aman merupakan indikator kinerja utama yang baru dilaksanakan BPOM di Kediri di tahun 2024 sehingga diperlukan upaya yang lebih untuk dapat mencapainya.

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawalan keamanan pangan di desa dapat terlaksana lebih baik dan memenuhi batas waktu sesuai juknis, serta kegiatan gerakan keamanan pangan dapat terpelihara dengan baik dan menyebar ke desa lainnya antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek.
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.
- Mendorong agar pemerintah daerah memasukan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran desa dan melakukan replikasi kegiatan.
- Mendorong pemerintah daerah dan desa untuk memasukan kegiatan keamanan pangan dalam kegiatan lain yang telah dilaksanakan desa (sinergitas kegiatan keamanan pangan dengan kegiatan lain).
- Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawalan keamanan pangan di desa.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 merupakan indikator kinerja yang baru dilaksanakan BPOM di Kediri pada tahun 2024. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 4 sekolah yang tersebar di Kabupaten Trenggalek. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Realisasi tahapan desa pangan aman pada triwulan I sebesar 5% dari target di triwulan I sebesar 5% sehingga capainnya 100,0%. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Perencanaan Advokasi Kelembagaan Desa dengan bobot 5%

BPOM di Kediri akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing-masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Desa Pangan Aman merupakan program / indikator kinerja baru bagi BPOM di Kediri yang baru dilaksanakan di tahun 2024, diperlukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang dijadikan lokus serta, melakukan koordinasi dengan BBPOM di Surabaya terkait tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Adanya Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, yang menyebabkan perubahan tahapan dan pembobotan pelaksanaan program Desa Pangan Aman sehingga memerlukan strategi – strategi khusus untuk bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 87 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah Desa Pangan Aman	Rp. 25.383.600	0	0%	0	- (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman sampai dengan TW I 2025 Tidak Efisien, karena belum ada realisasi anggaran dan capaian indikator baru 5% berupa perencanaan pelaksanaan kegiatan, kegiatan direncanakan baru dimulai pada pada TW II 2025.

g. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada TW I, terdapat beberapa kendala yaitu :

Tabel 88 Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Program Desa Pangan Aman merupakan program / indikator kinerja baru dilaksanakan pada tahun 2024 bagi BPOM di Kediri, Kota / Kabupaten yang di jadikan lokus berbeda dengan tahun yang sebelumnya.	-	Melakukan Koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek terkait pelaksanaan program Desa Pangan Aman	April 2025	Belum dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lokus pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Sehingga diperlukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang dijamin lokus secara intensif.					
2	Adanya Efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 diperlukan penyusunan ulang perencanaan tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman	Telah dilakukan penyusunan perencanaan tahapan program desa pangan aman menyesuaikan efisiensi belanja APBN TA 2025	Melakukan penyusunan perencanaan tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman menyesuaikan dengan Efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025	Maret 2025	Belum ada perencanaan tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman menyesuaikan dengan efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025	Perencanaan tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman telah menyesuaikan dengan efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek terkait pelaksanaan program Desa Pangan Aman sehingga tahapan program bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan pangan desa.

- Melakukan penyusunan dan perencanaan tahapan pelaksanaan program desa pangan aman dengan seksama dengan memperhitungkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi indikator kinerja ini akan digunakan sebagai dasar perencanaan pada pada TW II demi mencapai target sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.

IK 17. Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan target TW I dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 89 Perbandingan target TW I dan realisasi Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas sampai dengan triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	5 %	5 %	100 %	Baik

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 90 Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	100 %	5 %	5 %	Perlu Upaya Keras 

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 91 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	2024	0	0	0	-
	2025	5	5	100	Baik

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan

program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Target pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 adalah 1 pasar, Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di TW I belum dapat dihitung capainnya karena proses pelaksanaannya akan dihitung capainnya di akhir tahun 2025, namun realisasi tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas di TW I 2025 sudah dapat dihitung sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 5% dari target yang direncanakan di TW I sebesar 5% sehingga capaian yang diperoleh 100,0% (baik).

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dihitung capaiannya dikarenakan tahapan pelaksanaan pasar aman dari bahan berbahaya baru mulai dilaksanakan di bulan April 2025 dan akan dihitung capaiannya pada akhir tahun 2025. Program pasar aman dari bahan berbahaya merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 4 sekolah yang tersebar di Kabupaten Trenggalek. Program pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan indikator kinerja utama yang baru dilaksanakan oleh BPOM di Kediri di tahun 2024 sehingga diperlukan Upaya yang lebih untuk dapat mencapainya.

Realisasi tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I sebesar 5% dari target di di triwulan I sebesar 5% sehingga capainnya 100,0%. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Perencanaan Advokasi Kelembagaan Desa dengan bobot 5%
Tahapan pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas baru dilaksanakan pada TW II 2025, Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:
- Audiensi dan Advokasi Kelembagaan Pasar dengan bobot 25% (Perencanaan dan pelaksanaan)
- Bimtek dan penyuluhan komunitas pasar sesuai perencanaan 25%
- Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar 20%
- Pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi 20%
- Pengawasan Pasar pangan aman berbasis komunitas 10 %

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawasan keamanan pangan di desa dapat terlaksana lebih baik dan memenuhi batas waktu sesuai juknis, serta kegiatan gerakan keamanan pangan dapat terpelihara dengan baik dan menyebar ke desa lainnya antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah
- Mendorong agar pemerintah daerah memasukan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran dan melakukan replikasi kegiatan
- Mendorong Pemda/pengelola pasar/kader membuat peraturan/kebijakan pemasukan bahan/produk pangan ke dalam pasar.
- Melakukan pengolahan data hasil kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan dan memperhatikan batas waktu pelaporan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 merupakan indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada tahun 2024 bagi BPOM di Kediri. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan

4 sekolah yang tersebar di Kabupaten Trenggalek. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. BPOM di Kediri akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program pasar aman dari bahan berbahaya merupakan program / indikator kinerja baru bagi BPOM di Kediri, diperlukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang dijadikan lokus serta, melakukan koordinasi dengan BBPOM di Surabaya terkait tahapan pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 92 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp 15.263.600	0	0%	0	- (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas sampai dengan TW I 2025 Tidak Efisien, karena belum ada realisasi anggaran dan capaian indikator baru 5%, kegiatan direncanakan baru dimulai pada pada TW II 2025.

g. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada TW I, terdapat beberapa kendala yaitu:

Tabel 93 Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan program / indikator kinerja baru dilaksanakan pada tahun 2024 bagi BPOM di Kediri, Kota / Kabupaten yang di jadikan lokus berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Sehingga diperlukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang dijakan lokus secara intensif.	-	Melakukan Koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek terkait pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis Komunitas	April 2025	Belum dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lokus pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan
2	Adanya Efisiensi belanja	Telah dilakukan	Melakukan penyusunan	Maret 2025	Belum ada perencanaan	Perencanaa n tahapan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	pelaksanaan APBN TA 2025 diperlukan penyusunan ulang perencanaan tahapan pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis Komunitas	penyusunan perencanaan tahapan program Pangan Aman Berbasis Komunitas menyesuaikan efisiensi belanja APBN TA 2025	perencanaan tahapan pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis Komunitas menyesuaikan dengan Efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025		tahapan pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis Komunitas menyesuaikan dengan efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025	pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis Komunitas telah menyesuaikan dengan efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek terkait pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga tahapan program bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan pangan di pasar yang telah dilakukan intervensi.
- Melakukan penyusunan dan perencanaan tahapan pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas dengan seksama dengan memperhitungkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada, sehingga semua rencana tahapan program dapat dilaksanakan sesuai target yang dan tepat waktu.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025, diperoleh informasi bahwa capaian Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai POM di

Kediri telah memenuhi target yang ditetapkan. Laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 akan digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja triwulan I tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS 5**MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN DAN MUTU****IK 18. Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan****a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025**

Tabel 94 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISA SI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan	15	15	100	Baik

Realisasi persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 15% dengan target pada Triwulan I 15% sehingga diperoleh capaian 100% dengan kriteria “Sangat Baik”. Target Kegiatan persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan berupa Sosialisasi dan Penetapan Target UMKM dengan bobot tahapan sebesar 15%.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 95 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	15	16,48	Perlu Upaya Keras 

Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan, ditentukan berdasarkan beberapa tahapan berikut :

1. Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan dengan bobot 5%
2. Penetapan UMK Pangan Olahan Target dengan bobot 10%
3. Bimbingan Teknis CCPOB/CPOTB dan/atau Tahapan pemenuhan Aspek CPKB dengan bobot 30%
4. Fasilitasi Pendampingan serta pemeriksaan sarana dengan bobot 50%
5. Pelaporan dan Monitoring Evaluasi dengan bobot capaian 5%

Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025, telah dilakukan Sosialisasi dan penetapan target sarana yang akan dilakukan pendampingan UMK hingga memperoleh sertifikat CPPOB/CPOTB/ Surat Pemenuhan Aspek CPKB. Proses seleksi UMKM melibatkan lintas sektor terkait, seperti Hipmikindo dan Kadin di wilayah kerja Balai POM di Kediri. Sehingga, pada Triwulan I telah diperoleh realisasi 15% dari target tahunan sebesar 91%, dengan capaian 16,48% (**Perlu Upaya Keras**).

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 96 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan	2024	86,7	10	11,5	Kurang
	2025	91	15	16,48	Kurang

Perbandingan capaian triwulan I Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk indikator kinerja Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan mengalami kenaikan realisasi sebesar 72%, dimana capaian triwulan I Tahun 2024 sebesar 11,5% dan Tahun 2025 sebesar 16,48%.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian realisasi Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- Koordinasi bersama lintas sektor dalam kegiatan Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan sebelum dilakukannya penetapan target UMK yang akan didampingi memberikan informasi data UMKM yang potensial untuk dilakukan pendampingan.
- Pelaku usaha yang aktif untuk mendapat pendampingan agar memperoleh ijin edar BPOM yang cukup tinggi, sehingga memudahkan penetapan sarana yang akan didampingi ke tahapan Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pada Triwulan II (akhir April 2025).

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tahapan-tahapan penetapan UMKM yang akan didampingi sebelum dilakukannya bimbingan teknis pendampingan UMKM yaitu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memperoleh informasi data UMKM yang potensial untuk pembinaan sehingga proses pendampingan lebih optimal serta komitmen petugas dari Sertifikasi dan Inspeksi Balai POM di Kediri yang terus berupaya jemput bola dalam proses seleksi UMKM terpilih.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 97 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan	Rp. 3.775.000	Rp. 422.000	11,18 %	100	7,95 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran untuk indikator kinerja Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan belum sepenuhnya tercapai, karena target perencanaan anggaran akan digunakan untuk pemeriksaan *on site* seperti yang telah ditetapkan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Pada triwulan I Tahun 2025 belum terdapat kendala dalam pemenuhan realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Tabel 98 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya yang bisa dilakukan dalam menyempurnakan kinerja sasaran strategis Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan ditengah-tengah dilakukannya efisiensi anggaran yang terjadi, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pendampingan UMK secara *daring* untuk umum dan *coaching* terhadap pelaku usaha target pendampingan UMK yang sudah ditetapkan.
2. Fasilitasi Pendampingan berupa pemeriksaan sarana yang sebelumnya bisa dilakukan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, saat ini hanya bisa dilakukan selama 1 (satu) kali untuk masing-masing UMK dengan tambahan fasilitasi berupa pendampingan secara hybrid melalui zoom meeting.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil dari Indikator Kinerja Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan pada capaian triwulan I termasuk dalam kategori Baik. Berdasarkan hasil realisasi dan target capaian indikator. Hal ini dapat digunakan untuk melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya sehingga realisasi yang didapat sesuai/melampaui dengan target tahunan yang sudah direncanakan.

SASARAN STRATEGIS 6**TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT****IK.19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 55% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 85%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 100% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (55\% \times B) + (85\% \times C) + (100\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 99 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	61%	50%	81,97	Cukup

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 50 dari target 61, sehingga capaian sebesar 81,97%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri belum sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga mendapatkan kategori akan tercapai.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 100 Perbandingan target tahunan 2025 dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82%	50%	60,98	Perlu Upaya Keras 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 50% dari target 82%, sehingga capaian sebesar 60,98% dengan kriteria Perlu Upaya Keras sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target tahunan.

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 101 Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2024	19,38%	17,50%	90,3	Cukup
	2025	61%	50%	81,97	Cukup

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada tahun 2024 dari target TW I 2024 yaitu 19,38% didapat realisasi 17,50%, dengan realisasi tersebut % capaian TW I 2024 yang didapat adalah 90,3% dengan kriteria cukup. Pada TW I tahun 2025 target yang ingin dicapai adalah 61% namun realisasi hanya sebesar 50% sehingga % capaian yang didapat sebesar 81,97% dengan kriteria cukup.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kegiatan Penindakan sangat bergantung kepada stakeholder terkait Criminal Justice System yang terdiri dari Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada 2 perkara carry over, telah dilakukan koordinasi dengan Criminal Justice System di daerah dan sudah dilakukan proses Tahap 2. Pada akhir Triwulan I untuk 2 perkara carryover sudah sampai tahap putusan.
- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian 81,97% dalam kategori Cukup karena pada tahun n berjalan belum didapat perkara yang menunjang ketercapaian target.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Penguatan koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan sehingga terjadi satu pemahaman yang sama antara PPNS Badan POM, Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kendala terkait tahapan-tahapan dalam penyidikan.
- Mempertajam kegiatan intelijen dan patroli siber untuk memperoleh target perkara di tahun n berjalan

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 102 Efisiensi penggunaan sumber daya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI/ KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Rp. 44.350.800	Rp. 7.470.000	16,84	81,97	3,87 (Tidak Efisien)

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 103 Tindak lanjut rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	-

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Merencanakan kembali kegiatan penindakan dengan baik terutama kegiatan intelijen untuk mendapatkan perkara pada tahun n berjalan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah **Cukup** sehingga untuk indikator ini perlu dilakukan usaha supaya mendapatkan nilai sesuai yang ditargetkan. Berdasarkan hasil realisasi dan persentase capaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tergambar pada Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian pada triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

SASARAN STRATEGIS 7**TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT****IK.20 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis.
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 104 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	41,67%	83,33	Cukup

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Realisasi

sebesar 41,67 dari target 50, sehingga capaian sebesar 83,33%. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Kediri sudah sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga mendapatkan kategori Cukup.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 105 Perbandingan target tahunan 2025 dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	41,67%	46,29	Perlu Upaya Keras 

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 41,66% dari target 90%, sehingga capaian sebesar 46,29% dengan kriteria Perlu Upaya Keras sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target tahunan.

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 106 Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	2024	0	0	0	-
	2025	50 %	41,67 %	83,33	Cukup

Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar antara TW I tahun 2024 dengan TW I tahun 2025 tidak bisa dibandingkan karena pada tahun sebelumnya belum dilakukan penilaian karena IK ini baru ada di tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Persentase laporan analisis masih belum sesuai dengan target yang ingin dicapai karena ada laporan profiling siber yang tidak dilaporkan tepat waktu.
- Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun) akan dinilai pada triwulan IV sehingga belum dapat dimasukkan ke dalam akumulasi capaian.
- Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun) akan dinilai pada triwulan IV sehingga belum dapat dimasukkan ke dalam akumulasi capaian.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Membuat laporan patroli siber dan profiling siber tepat waktu di aplikasi inawcrawler dan dashboard penindakan.
- Mengumpulkan data untuk membuat Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 107 Efisiensi penggunaan sumber daya Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI /KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Rp 10.040.000	Rp. 2.460.000	24,5	41.67	2,40 (Tidak Efisien)

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 108 Tindak lanjut rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	-

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Membuat laporan patroli siber dan profiling siber tepat waktu di aplikasi inawcrawler dan dashboard penindakan.
- Mengumpulkan data untuk membuat Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah **Cukup** sehingga untuk indikator ini perlu dilakukan usaha supaya mendapatkan nilai sesuai yang ditargetkan. Berdasarkan hasil realisasi dan persentase capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar yang tergambar pada Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian pada triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

SASARAN STRATEGIS 8**LAYANAN PUBLIK BPOM YANG PRIMA****IK 21. Indeks Pelayanan Publik UPT**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek yang dituangkan sebagai Indeks F02, meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Penilaian UPP melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik diperoleh dengan perhitungan 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Indeks F03 diperoleh berdasarkan hasil survei dari pengguna layanan publik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 109 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Pada TW 1 belum dimulai periode penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada TW 1 belum terdapat nilai untuk IPP dari Balai POM di Kediri.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 110 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	-	-	-

Pada TW 1 belum dimulai periode penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Penilaian IPP dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi dan dilaksanakan sekali dalam satu tahun, sehingga tidak ada capaian target per triwulan. Pada TW 1 belum terdapat nilai untuk IPP dari Balai POM di Kediri.

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 111 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	2024	3,55	-	-	
	2025	4,2	-	-	

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan Pada TW 1 belum terdapat nilai untuk IPP dari Balai POM di Kediri.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan 1 telah terbit Standar Pelayanan BPOM di Kediri Tahun 2024, pembaharuan dari Standar Pelayanan tahun 2023. Standar pelayanan ini mencakup seluruh jenis layanan yang diberikan, terdapat perubahan jumlah layanan dari 6 layanan menjadi 9 jenis layanan menyesuaikan dengan surat Sekretaris Utama No. B-OT.03.04.2.02.25.99 tanggal 17 Februari 2025 perihal Upaya Pengembangan

Pelayanan Publik BPOM pada UPP BPOM dan Peraturan BPOM No. 28 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Review Standar Pelayanan Publik dilakukan setiap tahun untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan terbaru serta mengakomodir masukan dari konsumen terkait pelayanan publik di BPOM di Kediri. Selain itu, BPOM di Kediri telah melakukan renovasi ruang pelayanan publik dengan penambahan fasilitas, sarana dan prasarana bagi kelompok rentan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan terhadap 6 aspek pada penilaian Indeks Pelayanan Publik yaitu :

- Pada Triwulan I telah terbit Standar Pelayanan BPOM di Kediri Tahun 2025 yang mencakup seluruh jenis layanan yang diberikan yang merupakan hasil review standar pelayanan tahun 2024
- Monitoring evaluasi, tinjau ulang Standar Pelayanan Publik, dan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik telah dilakukan setiap tahun untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang terbaru serta mengakomodir masukan dari konsumen terkait standar pelayanan.
- Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di berbagai media elektronik/non elektronik.
- Melaksanakan SKM sesuai dengan ketentuan dan menindaklanjuti hasil SKM
- Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik secara bertahap termasuk renovasi ruangan pelayanan publik
- Mengembangkan inovasi pelayanan publik yaitu LINTAZ (Layanan Interaktif BPOM Kediri Terpadu via Zoom) yang mudah diakses masyarakat di mana saja sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor BPOM di Kediri atau ke Mal Pelayanan Publik.
- Menyusun kebijakan terkait *reward dan punishment* untuk penyelenggaraan pelayanan publik di BPOM di Kediri sebagai upaya meningkatkan motivasi pelayanan. Selain itu, pelatihan petugas pelayanan untuk meningkatkan profesionalisme SDM juga dilakukan oleh BPOM di Kediri.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 112 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Pelayanan Publik	Rp. 16.870.000	Rp. 3.910.000	23,18	0	- (Tidak Efektif)

Capaian indikator belum terdapat nilai karena merupakan indeks tahunan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Indeks Pelayanan Publik pada TW I belum dapat dihitung.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 113 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Publikasi standar layanan lebih ditingkatkan	Closed	-	-	Publikasi SP belum maksimal	Publikasi SP dimaksimalkan melalui berbagai media
2	Menyusun kebijakan pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan	Closed	-	-	Belum terdapat kebijakan pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan	Telah memiliki kebijakan pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan yang dapat meningkatkan motivasi petugas layanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
3	Membuat inovasi pelayanan publik	Closed	-	-	Belum memiliki inovasi pelayanan publik	Telah memiliki inovasi dalam pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat

h. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Menyusun Lembar Kerja Evaluasi penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik PEKPPP secara tepat waktu
2. Memenuhi data dukung sesuai aspek penilaian
3. Publikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan mandiri secara rutin
4. Melakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan profesionalisme SDM dan penerapan kebijakan reward dan punishment

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pelayanan publik di BPOM di Kediri. Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP), namun informasi dalam laporan telah digunakan untuk menyusun Standar Pelayanan Publik tahun 2025, merancang strategi peningkatan kualitas layanan, serta menindaklanjuti rekomendasi evaluasi sebelumnya. Selain itu, laporan ini menjadi bermanfaat dalam pengembangan inovasi pelayanan seperti Layanan Interaktif BPOM Kediri Terpadu via Zoom (LINTAZ) yang dimulai pada TW I 2025 ini, guna mendukung pelayanan yang lebih responsif terhadap masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 9**TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL****IK 22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu Langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan public kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan Zona Integritas dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assesment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen yaitu

No.	Komponen Pengungkit	Bobot
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%

6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
---	-------------------------------------	-----

No.	Komponen Hasil	Bobot
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5%
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 114 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISA SI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	N/A

Hasil penilaian LKE ZI disampaikan oleh Tim Penilai Internal pada akhir tahun/triwulan IV setelah dilakukan penyusunan LKE ZI. Nilai Pembangunan Zona Intergitas tidak menjadi target triwulan, pada triwulan I belum terdapat penilaian dari indikator kinerja ini.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 115 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISA SI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	-	-	N/A

Hasil penilaian LKE ZI disampaikan oleh Tim Penilai Internal pada akhir tahun/triwulan IV setelah dilakukan penyusunan LKE ZI. Nilai Pembangunan Zona Intergitas tidak menjadi target triwulan, pada triwulan I belum terdapat penilaian dari indikator kinerja ini.

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 116 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2024	-	-	-	N/A
	2025	75	-	-	N/A

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai POM di Kediri telah menerapkan secara bertahap Zona Integritas. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Kediri adalah:

- Menumbuhkan komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas secara konsisten dan meningkatkan peran aktif seluruh pegawai.
- Memenuhi data dukung Zona Integritas sesuai LKE Zona Integritas
- Melakukan survey terkait pelayanan public dan persepsi anti korupsi secara rutin dan menindaklanjuti analisis hasil survey.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Mereview SK Kepala Balai terkait anggota tim Zona Integritas untuk melibatkan seluruh pegawai termasuk pegawai baru dan lebih meningkatkan kinerja dan peran aktif seluruh pegawai dalam mengimplementasikan RB di Balai POM di Kediri.
- Program Kerja Tim AoC diharapkan dapat mendorong internalisasi dan implementasi Zona Integritas di Balai POM di Kediri.
- Melakukan penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai Balai POM di Kediri.
- Peningkatan Pemahaman ASN Balai POM di Kediri mengenai Core Value ASN BerAKHLAK melalui kegiatan yang lebih kreatif.

- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu.
- Penyampaian Laporan SPT Tahunan tepat waktu.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 117 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Rp.2.978.991.000	Rp.178.667.209	6,00	-	- (Tidak Efisien)

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 118 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomenda si	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Seles ai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
-	-	-	-	-	-	

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

-

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil dari Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas UPT BPOM tidak menjadi target triwulan sehingga pada triwulan I belum terdapat penilaian dari indikator kinerja ini.

IK 23. Nilai AKIP UPT BPOM**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025***Tabel 119 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Triwulan I Tahun 2025*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

b. Perbandingan Target Tahunan 2025 dan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025*Tabel 120 Perbandingan Target Tahunan 2025 dan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Nilai AKIP UPT BPOM*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP UPT	78,55	-	-	-

c. Perbandingan Capaian Triwulan I tahun 2025 dengan Capaian Triwulan I Tahun 2024*Tabel 121 Perbandingan Capaian Triwulan I tahun 2025 dengan Capaian Triwulan I Tahun 2024 pada Nilai AKIP UPT BPOM*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT	2024	77,75	-	-	-
	2025	78,55	-	-	-

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM pada triwulan keempat. Target nilai AKIP UPT merupakan target tahunan dengan realisasi penilaian didapatkan pada triwulan keempat sehingga untuk triwulan I hasil penilaian tidak dapat disimpulkan.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen dasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan penilaian AKIP tahun 2024, dapat disimpulkan yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan penilaian AKIP serta upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Kediri antara lain :

- 1. Melakukan penyusunan rencana kinerja dengan baik dan selaras antara Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
- 2. Pada pelaporan kinerja mengakomodir informasi perubahan yang terjadi, seperti perubahan definisi operasional, perubahan target, perubahan indikator kinerja dan sebagainya
- 3. Pelaporan kinerja menjelaskan upaya efisiensi penggunaan sumber daya Evaluasi Internal menjelaskan terkait seluruh indikator sasaran kinerja
- 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terkait capaian kinerja Evaluasi Internal memuat adanya kendala dan rekomendasi perbaikan dari masing masing indikator kinerja.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan kinerja pada tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian nilai AKIP UPT yaitu :

- 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- 2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3. Pemanfaatan aplikasi simetris dalam kegiatan perencanaan kinerja
- 4. Pemanfaatan aplikasi e-performance dalam pelaporan realisasi kinerja bulanan
- 5. Kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan yang dilaksanakan secara rutin oleh Balai POM di Kediri

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 122 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai AKIP UPT	Rp. 13.579.200	Rp. 6.180.375	45,51	-	- (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target anggaran tahun 2025 untuk indikator Nilai AKIP UPT belum terdapat realisasi pada triwulan I tahun 2025 sehingga untuk capaian indikator dan analisis efisiensi tidak dapat disimpulkan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 123 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi		Kondisi setelah rencana aksi	
		Selesai	Belum					
			Rencana Aksi	Timelin e				
1.	SOP Mikro Pengukuran/Pengumpulan Data Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan/kesalahan data	Menyempurnakan SOP tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan mekanisme perubahan/kesalahan data kinerja	-		2025	SOP Mikro Pengukuran /Pengumpulan Data Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan/kesalahan data	SOP Mikro Pengukuran/Pengumpulan Data Kinerja telah mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan/kesalahan data	

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2024 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 2024 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan,
3. Pemenuhan timeline pengujian dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian timeline pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan,
4. Kegiatan Pengujian dilakukan sesuai dengan standar ISO 17025 untuk menjamin validitas hasil pengujian laboratorium,
5. Dilakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter spesifik di balai lain yang menjadi anggota region manado pada program regionalisasi,

6. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS),

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada indikator Nilai AKIP UPT tahun 2024 target yang ditetapkan telah tercapai / melampaui namun belum bisa mencapai target renstra taun 2024, maka laporan kinerja dimanfaatkan untuk penyusunan target renstra tahun 2025 – 2029. Berdasarkan hasil realisasi dan presentase capaian indikator Nilai AKIP UPT hingga akhir tahun 2024 yang tergambar pada Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

IK.24 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sedangkan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), adalah: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output serta Dispensasi SPM. Sedangkan indikator pembentuk Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari Variabel efektivitas berupa Capaian RO (bobot 75%) dan Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%). Nilai IKPA dan EKA bersumber dari aplikasi SMART DJA dan aplikasi OM SPAN.

Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahun, namun untuk capaian IKPA dapat dipantau nilainya setiap bulan melalui aplikasi OM SPAN. Sampai dengan Triwulan I 2025 nilai IKPA seluruh Satker mendapatkan nilai 100 karena dampak dari efisiensi anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	N/A

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	N/A

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2024	-	-	-	N/A
	2025	-	-	-	N/A

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I 2025 belum dapat disajikan karena pengukuran dilakukan di akhir tahun, namun Balai POM di Kediri berupaya mengawal capaian IKU ini agar dapat mencapai nilai optimal. Beberapa langkah yang dilakukan Balai POM Kediri sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian output kinerja

- Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan sehingga berdampak positif terhadap penilaian realisasi anggaran dan RPD.
- Menyampaikan pelaporan melalui aplikasi secara tepat waktu

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Penggalangan komitmen seluruh pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala
- Keterlibatan pimpinan dalam mengawal capaian kinerja dan anggaran dalam mendukung tujuan organisasi

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Rp. 625.982.000	Rp. 798.442.589	127,55	-	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran melebihi target anggaran yang telah ditetapkan namun belum memenuhi capaian indikator sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator NKA UPT BPOM adalah **Tidak Efisien** karena tingkat efisiensinya tidak dapat dihitung. Realisaasi anggaran melebihi target karena penetapan target/rencana anggaran yang belum tepat, maka akan direvisi pada Trirulan ke-II, anggaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja NKA UPT BPOM.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomenda si	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Seles ai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
-	-	-	-	-	-	

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya untuk memperbaiki Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi baik kinerja maupun anggaran secara periodik, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi anggaran.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan ini digunakan untuk pemantauan progress terhadap target yang telah ditetapkan dan sebagai monitoring perbaikan terhadap capaian periode sebelumnya.

IK.25 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 124 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri

Menuju Maturitas	Tingkat	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive		0-16	1	-
Risk Aware		17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined		33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
			Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 125 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	-	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri akan diketahui nilainya pada triwulan IV sehingga masih belum bisa dilakukan perbandingan.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 126 Perbandingan target tahunan 2025 dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	3	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri akan diketahui nilainya pada triwulan IV sehingga masih belum bisa dilakukan perbandingan.

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 127 Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	2024	-	-	-	-
	2025	3	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri akan diketahui nilainya pada triwulan IV sehingga masih belum bisa dilakukan perbandingan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, nilai indeks manajemen risiko meningkat 0,5 dari sebelumnya 44 menjadi 44,5. Namun masih terdapat beberapa kelemahan pada tahun sebelumnya yaitu :

- Belum seluruh pegawai telah diberikan pelatihan terkait manajemen risiko.
- Belum memiliki perencanaan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai.
- Belum mengidentifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis;
- Tanggung jawab pengelolaan risiko dalam MPH dan uraian tugas SKP seluruh pegawai

yang terlibat dalam mengelola manajemen risiko.

- Tanggung jawab terkait pengelolaan risiko belum dituangkan baik dalam Matriks Peran Hasil (MPH) maupun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai yang menangani manajemen risiko.
- Belum dilakukan pengujian aktivitas pengendalian pada risiko inheren dengan kriteria level risiko tinggi dan level risiko sangat tinggi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Pada tahun 2025 seluruh pegawai diwajibkan untuk mengikuti pelatihan manajemen risiko di IDEAS.
- Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai.
- Mengidentifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis.
- Memasukkan tanggung jawab pengelolaan risiko dalam MPH dan uraian tugas SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam mengelola manajemen risiko.
- Menyusun dan menetapkan pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan selera risiko yang telah ditetapkan BPOM.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 128 Efisiensi penggunaan sumber daya Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri	Rp. 8.938.400	Rp. 399,900	4.47	-	-	Tidak Efisien

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya*Tabel 129 Tindak lanjut rekomendasi Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	-

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Melakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulanan terhadap progres pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian pada triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

INDIKATOR KINERJA DIREKTIF PENUGASAN**NILAI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA****IK 1. Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu indikator kinerja direktif penugasan oleh Kepala Badan POM. Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan nilai indikator kinerja tahunan, sehingga tidak dapat dilakukan pembahasan triwulan.

Adapun beberapa hal yang merupakan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja antara lain :

1. Penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa
2. Input perencanaan pengadaan barang/jasa dan diumumkan pada aplikasi SIRUP
3. Monitoring dan evaluasi perencanaan pengadaan barang/jasa

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

1. Bimtek atau peningkatan kompetensi secara berkala bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa baik oleh internal BPOM maupun oleh lintas sektor
2. Adanya kegiatan pendampingan oleh internal BPOM maupun lintas sektor terhadap pelaksana pengadaan barang dan jasa
3. Adanya kegiatan monev atau audit oleh inspektorat terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan pengadaan
2. Peningkatan kompetensi pelaksana pengadaan barang dan jasa terutama pada penggunaan e-catalog versi 6.0
3. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait

IK 2. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tiap Satuan Kerja di lingkungan BPOM didapatkan dari hasil penilaian Biro Umum tiap triwulan terhadap pengelolaan BMN seluruh satuan kerja di lingkungan Badan POM yang dilakukan sepanjang tahun. Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan;

Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi terdiri atas:

1. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.
 - a. Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
 - b. Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%).
 Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
 - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
 - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
2. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
 - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
 - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.
4. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui} / \text{total barang rusak berat} \times 100 \%$.

5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak x 100 %.

IK.3 Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 130 Perbandingan Target Dan Realisasi Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu	95 %	89,83 %	94,56 %	Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 131 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu	95 %	89,83 %	94,56 % 	Akan tercapai

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 132 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
	2024	95 %	83,33 %	87,71 %	Cukup

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu	2025	95 %	89,83 %	94,56 %	Baik

Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu:

$$= A + B \times 100\%$$

A = Aspek Tim Koordinasi POM

- a. Keterlibatan TKPPOM dan TPPS (10%)
- b. Peningkatan Koordinasi Tata Hubungan Kerja (40%)

B = Aspek Nonfisik BOK POM

- c. Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM (10%)
- d. Peningkatan Koordinasi Tata Hubungan Kerja (40%)

Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu terdiri dari Keterlibatan TKPPOM dan TPPS berupa SK TKPPOM dan/atau TPPS, Peningkatan Koordinasi Tata Hubungan Kerja berupa koordinasi dengan pemerintah daerah, Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Nonfisik BOK POM dan Peningkatan Tata Hubungan Kerja terkait DAK.

- d. **Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Telah dilakukan koordinasi oleh ke Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja BPOM di Kediri pada TW1 2025 dalam rangka monitoring hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat.

- e. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dukungan dari seluruh fungsi di UPT dan ditunjuknya *Person in Charge (PIC)* untuk monitoring masing-masing Kabupaten/Kota mendukung keberhasilan pencapaian kinerja.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 133 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu	Rp. 0,-	Rp. 0	0 %	0 %	(Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tidak ada anggaran untuk pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 134 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Monitoring Pelaksanaan Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Belum dilaksanakan Monitoring Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu	Sudah dilaksanakan Monitoring Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Koordinasi antar fungsi di BPOM di Kediri terkait pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah daerah.
2. Monitoring Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Hasil pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM aspek apotek/toko obat di monitoring dan dievaluasi tepat waktu adalah **Baik** dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan I ini memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

IK 4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Indikator Kinerja ini dihitung oleh Inspektorat Badan POM berdasarkan hasil survei terhadap responden yang telah menerima layanan publik dari BPOM di Kediri. Jenis layanan yang diberikan mengacu pada Lampiran Surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-OT.03.04.2.22.03.24.244 Tanggal 22 Maret Tahun 2024 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 2024. Jenis Layanan tersebut yaitu Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025*Tabel 135 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Tahun 2025*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-

Pada Triwulan I belum terdapat nilai realisasi dari Indikator kinerja ini dikarenakan nilai baru diperoleh pada akhir tahun. Periode pelaksanaan survei dimulai dari April hingga Juli sesuai Surat Dinas dari Sekretaris Utama No. B-OT.03.04.2.03.25.173 tanggal 24 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 2025.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025*Tabel 136 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Indeks Kepuasan Masyarakat*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-

Pada Triwulan I belum terdapat nilai realisasi dari Indikator kinerja ini dikarenakan nilai baru diperoleh pada akhir tahun berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi, data dapat diperoleh di Aplikasi SapaAPIP. Periode pelaksanaan survei dimulai dari April hingga Juli sesuai Surat Dinas dari Sekretaris Utama perihal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 2025.

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 137 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	2024	89,25	-	-	
	2025	90,75	-	-	

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan Pada TW 1 belum terdapat nilai untuk IKM dari Balai POM di Kediri.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Kediri antara lain :

- Review Standar Pelayanan Publik dilakukan setiap tahun untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan terbaru serta mengakomodir masukan dari konsumen terkait pelayanan publik di BPOM di Kediri.
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan terkait standar pelayanan dengan melibatkan berbagai unsur lintas sektor telah dilaksanakan pada tahun 2024
- BPOM di Kediri telah melakukan renovasi ruang pelayanan publik dengan penambahan fasilitas, sarana dan prasarana bagi kelompok rentan.
- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara mandiri telah rutin dilakukan setiap bulan dan tindak lanjut hasil SKM telah dilaksanakan secara berkala
- Mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan akses layanan publik bagi masyarakat
- Pelaksanaan survei kepada pelanggan secara rutin di setiap bulan akan memudahkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada periode yang telah ditentukan sehingga memenuhi jumlah minimal responden yang harus disurvei

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks kepuasan masyarakat yaitu :

- Monitoring evaluasi, tinjau ulang Standar Pelayanan Publik untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang terbaru serta mengakomodir masukan dari konsumen terkait standar pelayanan
- Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai forum diskusi antara BPOM di Kediri dan pengguna layanan guna menjangkau aspirasi secara langsung
- Melaksanakan SKM sesuai dengan ketentuan dan menindaklanjuti hasil SKM
- Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik secara bertahap termasuk renovasi ruangan pelayanan publik
- Mengembangkan inovasi pelayanan publik secara online yang mudah diakses masyarakat di mana saja sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor BPOM di Kediri atau ke Mal Pelayanan Publik
- Peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas pelayanan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pemberlakuan kebijakan *reward* and *punishment*.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 138 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Rp. 84.350.000	-	-	-	-

Capaian indikator belum terdapat nilai karena merupakan indeks tahunan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Indeks Pelayanan Publik pada TW I belum dapat dihitung.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 139 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum		

			Rencana Aksi	Timeline		
1	Publikasi Hasil SKM bulanan belum dilaksanakan	-	Melaksanakan publikasi hasil SKM Mandiri secara rutin melalui media sosial	Rutin setiap bulan	Belum dilakukan publikasi hasil SKM bulanan	Hasil SKM telah dipublikasikan secara rutin

h. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dengan pemenuhan target responden
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil SKM dan masukan-masukan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di BPOM di Kediri
3. Menindaklanjuti hasil SKM yang dilaksanakan untuk memberikan perbaikan pelayanan secara terus-menerus
4. Publikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan mandiri secara rutin

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pelayanan publik di BPOM di Kediri. Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), namun informasi dalam laporan telah digunakan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan, merancang strategi peningkatan kualitas layanan, serta menindaklanjuti rekomendasi evaluasi sebelumnya.

IK.5 Nilai Pengelolaan Kearsipan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 140 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Triwulan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kearsipan UPT	0	0	0	NA

Penilaian evaluasi kearsipan akan dilakukan oleh Biro Umum Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025. Target nilai Kearsipan merupakan target tahunan dan realisasi terhadap target nilai Kearsipan tersebut baru dapat diperoleh pada akhir tahun setelah Biro Umum Badan POM melakukan penilaian.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025

Tabel 141 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Nilai Pengelolaan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kearsipan UPT	87	0	0	NA

Penilaian evaluasi kearsipan akan dilakukan oleh Biro Umum Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2025, sehingga pada periode triwulan III tahun 2024 ini belum dapat diperoleh realisasi terhadap target nilai kearsipan tersebut. Nilai evaluasi kearsipan Balai POM di Kediri adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Biro Umum atas Arsip Balai POM di Kediri.

c. Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024

Tabel 142 Perbandingan capaian triwulan I tahun 2025 dengan capaian triwulan I tahun 2024 pada Nilai Pengelolaan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kearsipan UPT	2024	89,5	0	0	NA
	2025	87	0	0	NA

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kendala yang terjadi adalah arsip dari beberapa fungsi masih belum sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku, kemudian Perbaikan kinerja yang perlu dilakukan pada indikator ini yaitu dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian penataan dokumen arsip sesuai dengan pedoman kearsipan/tata naskah dinas yang berlaku sehingga meminimalkan ketidaksesuaian pengelolaan/penataan arsip dan juga mewujudkan tata Kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pengelolaan kearsipan yaitu :

- Setiap per triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi
- Segera dilakukan pemaparan jika terdapat update atau pembaruan tata naskah dinas

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 143 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Kearsipan UPT	-	-		-	-

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 144 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya untuk memperbaiki Kinerja Kearsipan di Triwulan 1 dengan melakukan sosialisasi kepada para pengelola arsip terkait peraturan – peraturan terbaru dari hasil desk atau audit kearsipan UPT

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan ini digunakan untuk pemantuan terhadap target yang sudah ditetapkan dan perencanaan tahun depan.

3.2 Realisasi Anggaran

INDIKATOR KINERJA DIREKTIF PENUGASAN

REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran

Balai POM di Kediri pada tahun 2025 menerima pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 24,253,063,000. Pada awal triwulan I disampaikan bahwa terdapat blokir anggaran dalam rangka efisiensi sesuai dengan surat edaran Pagu efisiensi Balai POM di Kediri pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9,005,252,000.

Realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan I adalah sebesar Rp. 1.719.224.252 dengan presentase capaian realisasi terhadap target tahunan adalah sebesar 19,09%. Adapun rincian pagu dan realisasi sampai dengan triwulan I antara lain sebagai berikut :

- Realisasi belanja pegawai sampai dengan TW I tahun 2025 adalah sebesar Rp. 583,204,264 dengan % realisasi sebesar 26.56% dari target pagu Rp. 2,195,410,000.
- Realisasi belanja barang sampai dengan TW I tahun 2025 adalah sebesar Rp. 462,569,953 dengan % realisasi sebesar 13.40% dari target pagu Rp. 3,450,870,000.
- Realisasi belanja modal sampai dengan TW I tahun 2025 adalah sebesar Rp. 673,000,000 dengan % realisasi sebesar 3.62% dari target pagu Rp. 18,606,783,000.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja										Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer		
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,820,870,000 75,694,730 (4.16%)	18,606,783,000 673,000,000 (3.62%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	20,427,653,000 748,694,730 (3.67%)	
		SISA	0	1,745,175,270	17,933,783,000	0	0	0	0	0	0	19,678,958,270	
2	6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	PAGU REALISASI	2,195,410,000 583,204,264 (26.56%)	1,630,000,000 386,875,223 (23.73%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,825,410,000 970,079,487 (25.36%)	
		SISA	1,612,205,736	1,243,124,777	0	0	0	0	0	0	0	2,855,330,513	
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	2,195,410,000 583,204,264 (26.56%)	3,450,870,000 462,569,953 (13.40%)	18,606,783,000 673,000,000 (3.62%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	24,253,063,000 1,718,774,217 (7.09%)	
		SISA	1,612,205,736	2,988,300,047	17,933,783,000	0	0	0	0	0	0	22,534,288,783	

Balai POM Kediri berupaya dalam memaksimalkan pencapaian target kinerja dan mengoptimalkan serapan anggaran antara lain yaitu :

- Menjaga komitmen dari level pimpinan hingga staf BPOM di Kediri
- Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan oleh masing masing fungsi yang

ada di Balai POM di Kediri

3. Melaksanakan monitoring terhadap RPD baik setiap bulan maupun triwulanan
4. Memperkuat pengendalian internal melalui pembentukan tim penyusun program/kegiatan (PIPK) dan Tim Monev sehingga tersedia informasi data yang handal
5. Menyusun perencanaan pengadaan serta melakukan monev terhadap rencana yang Disusun.

Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja pada periode TW I tahun 2025

Tabel 145 realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja pada periode TW I tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Maret			Anggaran		
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81,75	81,75	85,00	103,98	15.025.000	-	-
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26		0	0	40.122.000	1.979.460	4,93
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75,00	80,00	106,67	28.630.000	-	-
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100,00	100	100,00	4.458.000	219.940	4,93

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahunan	Maret			Anggaran		
				Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	Pagu	Realisasi	% Capaian
	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75,00	100,00	133,33	74.726.000	2.907.700	3,89
	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	98	89,00	85,00	95,51	28.630.000	-	-
	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	93,00	100,00	107,53	26.941.500	170.000	0,63
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80,00	100,00	125,00	26.941.500	170.000	0,63
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	92,25	92,25	100,00	108,40	39.513.000	860.000	2,18

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Maret			Anggaran		
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	Pagu	Realisasi	% Capaian
			dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80,00	93,00	116,25	20.070.000	860.000	4,29
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87,97	87,97	99,37	112,95	34.410.000	428.000	1,24
		12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67	58,00	6,67	11,49	16.071.000	600.000	3,73
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi									

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Maret			Anggaran		
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	Pagu	Realisasi	% Capaian
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	8,00	9,83	122,88	4.847.415.000	710.063.080	14,65
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84,37	84,37	89,92	106,58	41.861.000	3.014.000	7,20
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	5,00	5,00	100,00	57.803.000	-	-
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	1	5,00	5,00	100,00	39.515.000	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Maret			Anggaran		
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	Pagu	Realisasi	% Capaian
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	5,00	,00	- ,00	33.372.000	-	-
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	91	15,00	11,67	77,78	4.462.000	422.000	9,46
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	82	61,00	50,00	81,97	221.754.000	7.470.000	3,37

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Maret			Anggaran		
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	Pagu	Realisasi	% Capaian
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT									
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50,00	41,67	83,33	17.989.000	2.460.000	13,68

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Maret			Anggaran		
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	Pagu	Realisasi	% Capaian
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20			0	20.405.000	3.910.000	19,16
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00			0	453.126.900	178.667.209	39,43
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	78,55			0	33.749.500	6.180.375	18,31
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00			0	2.868.448.000	798.442.589	27,84
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3			0	9.813.600	399.900	4,07

Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Berikut merupakan tabel Realisasi Anggaran untuk setiap Sasaran Strategis pada periode TW I tahun 2025

Tabel 146 Realisasi Anggaran untuk setiap Sasaran Strategis pada periode TW I tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Nilai Sasaran Strategis (NSS)	Realisasi Anggaran		
			Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,61%	339.467.000	7.595.100	2,24%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		16.071.000	600.000	3,73%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	110,00%	4.847.415.000	710.063.080	14,65%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101,64%	172.551.000	3.014.000	1,75%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	77,80%	4.462.000	422.000	9,46%

No	Sasaran Strategis	Nilai Sasaran Strategis (NSS)	Realisasi Anggaran		
			Pagu	Realisasi	% Capaian
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	81,97%	221.754.000	7.470.000	3,37%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00%	17.989.000	2.460.000	13,68%
8	Layanan Publik UPT yang prima	96,17%	20.405.000	3.910.000	19,16%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		57,200,000	39,998,956	29,23%

a. Realisasi Anggaran dan Target per Program dan Kegiatan sampai dengan TW III 2024

No.	Output	Target 2025	Kinerja/Fisik			Anggaran		
			Target TW I	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
7	CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	7	0%		0	0	-
8	CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	8,33%		0	0	-
9	PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	0%		430.000.000	37.063.080	8,62
10	QCD.U10 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM DI KEDIRI	2	2	0%		221.754.000	7.470.000	3,37
11	QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	4	4	1%		57.803.000	0	0,00
12	QDB.002 - Desa Pangan Aman	1	1	1%		39.515.000	0	0,00
13	QDB.003 - Pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	1%		33.372.000	0	0,00
14	QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan	45	45	5%		15.025.000	0	0,00

No.	Output	Target 2025	Kinerja/Fisik			Anggaran		
			Target TW I	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
	(RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans							
15	QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	5	5	0%		4.462.000	422.000	9,46
16	QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	70	70	8,57%		44.580.000	2.199.400	4,93
17	QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	177	177	5,08%		74.726.000	2.907.700	3,89
18	QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	72	72	2,78%		53.883.000	340.000	0,63
19	QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	10	10	0%		16.071.000	600.000	3,73
20	QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan	158	158	0%		151.253.000	1.588.000	1,05

No.	Output	Target 2025	Kinerja/Fisik			Anggaran		
			Target TW I	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
	dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT							
21	RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	8,33%		4.417.415.000	673.000.000	15,24
22	EBA.956 - Layanan BMN	1	1	8,33%		8.000.000		
23	EBA.994 - Layanan Perkantoran	1	1	8,33%		3.313.319.000	1.386.205.154	

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip

Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Terhadap Penilaian AKIP Balai POM di Kediri Tahun 2024

Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat terhadap penilaian AKIP BPOM di Kediri Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Memastikan adanya dokumen pendukung atas perubahan RAPK Balai POM di Kediri	1. Usulan perubahan RAPK telah diajukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan. 2. SOP Mikro Pengukuran / Pengumpulan Data Kinerja terkait adanya perubahan data telah di lakukan review.	1. Memastikan balasan usulan perubahan RAPK telah diajukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan. 2. Melakukan reuiu SOP Mikro Pengukuran/Pengumpulan Data Kinerja terkait adanya perubahan data.	Minggu ke 2 bulan April 2025	a. Terdapat revisi dokumen RAPK tanggal 20 Mei 2024 dan data pada aplikasi SIMETRIS telah dilakukan penyesuaian namun dokumen pendukung tidak ditemukan, yaitu: 1) Dokumen usulan perubahan RAPK ke Biro Perencanaan dan Keuangan; 2) Dokumen persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap perubahan RAPK	1.Usulan perubahan RAPK telah diajukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan. 2.SOP Mikro Pengukuran/Pengumpulan Data Kinerja terkait adanya perubahan data telah di lakukan review.
2	Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan pada e-SAKIP REVIU dan	Dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada subsite Balai POM di	1. Menyusun daftar seluruh dokumen perencanaan yang harus dipublikasikan. 2. Memastikan	TW I	Belum seluruh dokumen perencanaan dipublikasikan pada subsite Balai POM di	Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada subsite Balai POM di Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	subsite Satuan Kerja	Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id) yaitu dokumen berupa PK Revisi, RAPK Revisi dan Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra	seluruh dokumen perencanaan tahun 2025 dipublikasikan pada subsite Balai POM di Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id		Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id) yaitu dokumen berupa PK Revisi, RAPK Revisi dan Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra	REVIU (esr.menpan.go.id) yaitu dokumen berupa PK Revisi, RAPK Revisi dan Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra
3	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Target indikator kinerja tahun 2025 pada dokumen SAKIP (PK, RAPK, EVIN dan Lapkin Interim) selaras.	1. Memastikan keselarasan target dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja yang tertuang dalam form penyelarasan data dan melakukan penyesuaian target yang berbeda. 2. Dibuatkan form perubahan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggungjawab data dan Kepala UPT	TW I s/d TW IV	Terdapat Perbedaan target indikator kinerja tahun 2024 pada dokumen SAKIP (PK, RAPK, EVIN dan Lapkin Interim)	Target indikator kinerja tahun 2025 pada dokumen SAKIP (PK, RAPK, EVIN dan Lapkin Interim) selaras.
	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi	Matriks reviu target indikator tahun 2024 & 2025 mencantumkan justifikasi untuk	1. Menyusun justifikasi atau alasan yang jelas mengapa target ditetapkan lebih rendah	Minggu ke 2 bulan April 2025	Matriks reviu target indikator tahun 2024 belum mencantumkan justifikasi untuk	Matriks reviu target indikator tahun 2024 & 2025 telah mencantumkan justifikasi untuk target yang lebih

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.	target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.	2. Mengidentifikasi seluruh target indikator kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. 3. Membuat matriks reviu yang mencantumkan target beserta justifikasi terkait penurunan target tersebu. 4. Dibuatkan lembar konfirmasi terkait justifikasi target tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan melampirkan : 1. Target dan capaian 2023, 2. Target dan capaian 2024 serta justifikasinya		target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.	rendah dari realisasi tahun sebelumnya.
	Menyempurnakan SOP tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan mekanisme		1. Melakukan review serta menyempurnakan SOP bersama tim terkait (perencana, pengukuran kinerja, dan pimpinan) lampirkan form usulan perubahan	Minggu ke 2 bulan April 2025	SOP Mikro Pengukuran / Pengumpulan Data Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan /	SOP Mikro Pengukuran / Pengumpulan Data Kinerja sudah mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan / kesalahan data, antara lain: Tahap

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	perubahan/kesalahan data kinerja;		2. Sosialisasi SOP yang disempurnakan kepada seluruh Katim tim monev dalam pengumpulan, pengukuran, dan pelaporan data kinerja.		kesalahan data, antara lain: Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan; Tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan.	usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan; Tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan.
	Menyusun notulen rapat evaluasi internal yang menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja secara spesifik (tidak hanya bersifat umum)	Laporan Evaluasi Internal telah menyajikan arahan pimpinan atas kendala pengukuran dan/atau hasil capaian kinerja secara spesifik (hanya bersifat umum)	1. Memastikan setiap rapat evaluasi internal mendokumentasikan arahan pimpinan secara spesifik untuk setiap topik yang dibahas. 2. Pembahasan permasalahan dituangkan dalam form rekomendasi tindak lanjut dengan bahasan pada rapat sebelumnya	Setiap bulan pada rapat bulanan	Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan arahan pimpinan atas kendala pengukuran dan/atau hasil capaian kinerja secara spesifik (hanya bersifat umum)	Laporan Evaluasi Internal telah menyajikan arahan pimpinan atas kendala pengukuran dan/atau hasil capaian kinerja secara spesifik (hanya bersifat umum)
	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja dapat ditelusur/ sesuai dengan dokumen monev (sumber	perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja dapat ditelusur/ sesuai dengan dokumen	1. Membandingkan data capaian kinerja pada RHPK dengan sumber data yang tercantum dalam dokumen monev, memastikan kesesuaian antara keduanya. 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi jika terdapat perbedaan data	Setiap bulan	Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) / kertas kerja capaian indikator tidak	Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) / kertas kerja capaian indikator dapat ditelusur/ sama dengan dokumen

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	data)	monev (sumber data)	antara RHPK/kertas kerja dengan dokumen monev, termasuk mencari penyebab perbedaan 3. Dibuatkan lembar konfirmasi terkait justifikasi perubahan data yang dilaporkan 4. Dibuatkan kertas kerja penjelasan dan sumber data pembilang dan penyebut terperinci		dapat ditelusur/ berbeda dengan dokumen monev (sumber data), sebagai contoh indikator Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan pada triwulan II tahun 2024.	monev (sumber data).
	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SKP, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Form penyalarsan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggung jawab data dan Kepala UPT dan lembar konfirmasi perubahan data dan justifikasinya telah dibuat	1. Dibuatkan form penyalarsan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggung jawab data dan Kepala UPT 2. Dibuatkan lembar konfirmasi perubahan data dan justifikasinya	Setiap bulan	Terdapat Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja antara Simetris, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Tidak Terdapat Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja antara Simetris, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja lagi.
	Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;	Mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi	1. Menyusun kebijakan yang mengatur mekanisme pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) berdasarkan hasil	Februari 2025	Belum menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran	Mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi telah ditetapkan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
			pengukuran kinerja individu dan organisasi yang objektif dan terukur 2. Menyusun prosedur yang mengatur bagaimana proses pemberian reward dan punishment dilakukan. Prosedur ini harus mencakup mekanisme evaluasi kinerja, penentuan penerima reward atau punishment, serta jenis penghargaan dan sanksi yang akan diberikan. 3. Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai		kinerja individu dan/atau organisasi.	
	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS dilakukan secara tertib	Mengisi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara lengkap (berdasarkan form rencana tindak lanjut yang sudah dibahas setiap bulan pada rapat monev bulanan)	Setiap bulan	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS tahun 2024 belum dilakukan secara tertib	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS tahun 2024 dan 2025 dilakukan secara tertib
	Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi	Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS optimal	Mengisi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara lengkap (berdasarkan	Setiap bulan	Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS belum optimal	Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS sudah mencantumkan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	SIMETRIS secara memadai		form rencana tindak lanjut yang sudah dibahas setiap bulan pada rapat monev bulanan)		yaitu belum mencantumkan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target	kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target
	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	LEI direktif penugasan dan dievaluasi dalam Lapkin interim Tahun 2025	1. Menyusun penjelasan yang mencakup alasan dan latar belakang penambahan indikator kinerja, termasuk penambahan indikator direktif penugasan. 2. Menambah format laporan yang mencakup bagian khusus untuk menjelaskan indikator baru	April 2025	Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perjanjian Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024, yaitu: Nilai Pengelolaan BMN, Nilai Kualitas PBJ, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/	LEI direktif penugasan dan dievaluasi dalam Lapkin interim (Tahun 2025 IKU direktif penugasan tidak tercantum dalam PK dan RAPK)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					Kabupaten/Kota , Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT, Nilai Pengelolaan Kearsipan	
	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja;	Realisasi indikator kinerja antara SKP Kepala BPOM di Kediri, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja sama	1. Dibuatkan form penyelarasan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggungjawab data dan Kepala UPT 2. Dibuatkan lembar konfirmasi perubahan data dan justifikasinya	Setiap bulan	Terdapat Perbedaan realisasi indikator kinerja antara SKP Kepala BPOM di Kediri, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja (sama dg 2.d)	Tidak terjadi lagi perbedaan realisasi indikator kinerja antara SKP Kepala BPOM di Kediri, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja
	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya	Laporan Kinerja triwulan tahun 2025 menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi periode triwulan sebelumnya	1. Mengumpulkan data kinerja untuk setiap triwulan sebelumnya untuk dijadikan dasar perbandingan dengan kinerja triwulan tahun berjalan. 2. melakukan analisis terkait perubahan pencapaian kinerja antar triwulan dan menambahkan analisis tersebut dalam laporan,	TW I – TW IV	Laporan Kinerja triwulan II s.d. III tahun 2023 dan triwulan II s.d III tahun 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi periode triwulan sebelumnya	Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 sudah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi periode triwulan sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
			untuk menjelaskan penyebab atau faktor yang mempengaruhi perbedaan kinerja.			
	- Menyusun laporan Kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran - Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan analisis penyebab kegagalan secara memadai	Laporan Kinerja Tahunan - menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran - Analisis penyebab kegagalan terkait tidak tercapainya target indikator - Belum memadai (bukan merupakan kendala/ tidak mengidentifikasi akar masalah)	1. Penyusunan laporan kinerja interim membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya (sesuai dengan pedoman penyusunan Lapkin tahun 2025) 2. Menyajikan data analisis efisiensi dan penyebab kegagalan tidak tercapainya indikator (Bab III)	TW I – TW IV	Laporan Kinerja Tahun 2023: - Belum menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja persasaran - Analisis penyebab kegagalan terkait tidak tercapainya target indikator belum memadai (bukan merupakan kendala/tidak mengidentifikasi akar masalah)	Laporan Kinerja Tahun 2024 : - menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran - Analisis penyebab kegagalan terkait tidak tercapainya target indikator belum memadai (bukan merupakan kendala/tidak mengidentifikasi akar masalah)
	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja terkait implementasi SAKIP;	Personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja sudah mengikuti pelatihan terkait SAKIP	1. Identifikasi Personil yang Belum Mengikuti Pelatihan 2. Menentukan Jenis Pelatihan yang Diperlukan	TW II	Beberapa personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP	Personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja sudah mengikuti pelatihan terkait SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Evaluasi atas capaian RAPK triwulan bersangkutan	laporan evaluasi internal membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya	Penyusunan laporan evaluasi internal membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya (sesuai dengan pedoman penyusunan Lapkin tahun 2025)	TW I – TW IV	Laporan Evaluasi Internal triwulan III tahun 2024 belum menyajikan evaluasi atas capaian RAPK triwulan III tahun 2024 (menyajikan evaluasi atas capaian RAPK triwulan II tahun 2024);	laporan evaluasi internal membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya (sesuai dengan pedoman penyusunan Lapkin tahun 2025)
	Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Identifikasi kendala dan rekomendasi /rencana aksi secara memadai	Laporan Evaluasi Internal menyajikan Identifikasi kendala dan rekomendasi /rencana aksi secara memadai	1. Melakukan identifikasi kendala atau penyebab kegagalan pencapaian target. Dapat dengan memasukkan faktor eksternal seperti perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, atau masalah logistik. 2. Menyusun rencana aksi yang konkrit dan relevan untuk mengatasi setiap kendala yang ditemukan	TW I – TW IV	Laporan Evaluasi Internal belum mengidentifikasi kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target, rekomendasi/ rencana aksi kurang relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi dan/atau belum terdapat rencana aksi	Laporan Evaluasi Internal sudah mengidentifikasi kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target, rekomendasi/ rencana aksi kurang relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi
	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Monitoring tindak	Laporan Evaluasi Internal triwulan menyajikan monitoring tindak	1. Mengumpulkan Data Tindak Lanjut dari Triwulan Sebelumnya	TW I – TW IV	Laporan Evaluasi Internal triwulan I tahun 2024	Laporan Evaluasi Internal triwulan I tahun 2025 belum menyajikan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya	lanjut rencana aksi periode sebelumnya	2. Melakukan Verifikasi Implementasi: Memverifikasi apakah tindak lanjut yang telah ditentukan pada triwulan sebelumnya telah dijalankan 3. menentukan status close/Open setiap rencana aksi triwulan sebelumnya.		belum menyajikan monitoring tindak lanjut rencana aksi periode sebelumnya	monitoring tindak lanjut rencana aksi periode sebelumnya

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip

Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Terhadap Penilaian AKIP Balai POM di Kediri Tahun 2024

Tabel 147 Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat terhadap penilaian AKIP BPOM di Kediri Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Memastikan adanya dokumen pendukung atas perubahan RAPK Balai POM di Kediri	3. Usulan perubahan RAPK telah diajukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan. 4. SOP Mikro Pengukuran / Pengumpulan Data Kinerja terkait adanya perubahan data telah di lakukan review.	3. Memastikan balasan usulan perubahan RAPK telah diajukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan. 4. Melakukan reuiu SOP Mikro Pengukuran/Pengumpulan Data Kinerja terkait adanya perubahan data.	Minggu ke 2 bulan April 2025	a. Terdapat revisi dokumen RAPK tanggal 20 Mei 2024 dan data pada aplikasi SIMETRIS telah dilakukan penyesuaian namun dokumen pendukung tidak ditemukan, yaitu: 1) Dokumen usulan perubahan RAPK ke Biro Perencanaan dan Keuangan; 2) Dokumen persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap perubahan RAPK	1.Usulan perubahan RAPK telah diajukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan. 2.SOP Mikro Pengukuran/Pengumpulan Data Kinerja terkait adanya perubahan data telah di lakukan review.
2	Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan pada e-SAKIP REVIU dan	Dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada subsite Balai POM di	3. Menyusun daftar seluruh dokumen perencanaan yang harus dipublikasikan. 4. Memastikan	TW I	Belum seluruh dokumen perencanaan dipublikasikan pada subsite Balai POM di	Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada subsite Balai POM di Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	subsite Satuan Kerja	Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id) yaitu dokumen berupa PK Revisi, RAPK Revisi dan Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra	seluruh dokumen perencanaan tahun 2025 dipublikasikan pada subsite Balai POM di Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id		Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id) yaitu dokumen berupa PK Revisi, RAPK Revisi dan Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra	REVIU (esr.menpan.go.id) yaitu dokumen berupa PK Revisi, RAPK Revisi dan Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra
3	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Target indikator kinerja tahun 2025 pada dokumen SAKIP (PK, RAPK, EVIN dan Lapkin Interim) selaras.	3. Memastikan keselarasan target dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja yang tertuang dalam form penyelarasan data dan melakukan penyesuaian target yang berbeda. 4. Dibuatkan form perubahan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggungjawab data dan Kepala UPT	TW I s/d TW IV	Terdapat Perbedaan target indikator kinerja tahun 2024 pada dokumen SAKIP (PK, RAPK, EVIN dan Lapkin Interim)	Target indikator kinerja tahun 2025 pada dokumen SAKIP (PK, RAPK, EVIN dan Lapkin Interim) selaras.
	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi	Matriks reviu target indikator tahun 2024 & 2025 mencantumkan justifikasi untuk	5. Menyusun justifikasi atau alasan yang jelas mengapa target ditetapkan lebih rendah	Minggu ke 2 bulan April 2025	Matriks reviu target indikator tahun 2024 belum mencantumkan justifikasi untuk	Matriks reviu target indikator tahun 2024 & 2025 telah mencantumkan justifikasi untuk target yang lebih

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.	target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.	6. Mengidentifikasi seluruh target indikator kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. 7. Membuat matriks reviu yang mencantumkan target beserta justifikasi terkait penurunan target tersebu. 8. Dibuatkan lembar konfirmasi terkait justifikasi target tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan melampirkan : 1. Target dan capaian 2023, 2. Target dan capaian 2024 serta justifikasinya		target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.	rendah dari realisasi tahun sebelumnya.
	Menyempurnakan SOP tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan mekanisme		3. Melakukan review serta menyempurnakan SOP bersama tim terkait (perencana, pengukuran kinerja, dan pimpinan) lampirkan form usulan perubahan	Minggu ke 2 bulan April 2025	SOP Mikro Pengukuran / Pengumpulan Data Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan /	SOP Mikro Pengukuran / Pengumpulan Data Kinerja sudah mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan / kesalahan data, antara lain: Tahap

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	perubahan/kesalahan data kinerja;		4. Sosialisasi SOP yang disempurnakan kepada seluruh Katim tim monev dalam pengumpulan, pengukuran, dan pelaporan data kinerja.		kesalahan data, antara lain: Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan; Tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan.	usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan; Tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan.
	Menyusun notulen rapat evaluasi internal yang menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja secara spesifik (tidak hanya bersifat umum)	Laporan Evaluasi Internal telah menyajikan arahan pimpinan atas kendala pengukuran dan/atau hasil capaian kinerja secara spesifik (hanya bersifat umum)	3. Memastikan setiap rapat evaluasi internal mendokumentasikan arahan pimpinan secara spesifik untuk setiap topik yang dibahas. 4. Pembahasan permasalahan dituangkan dalam form rekomendasi tindak lanjut dengan bahasan pada rapat sebelumnya	Setiap bulan pada rapat bulanan	Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan arahan pimpinan atas kendala pengukuran dan/atau hasil capaian kinerja secara spesifik (hanya bersifat umum)	Laporan Evaluasi Internal telah menyajikan arahan pimpinan atas kendala pengukuran dan/atau hasil capaian kinerja secara spesifik (hanya bersifat umum)
	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja dapat ditelusur/ sesuai dengan dokumen monev (sumber	perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja dapat ditelusur/ sesuai dengan dokumen	5. Membandingkan data capaian kinerja pada RHPK dengan sumber data yang tercantum dalam dokumen monev, memastikan kesesuaian antara keduanya. 6. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi jika terdapat perbedaan data	Setiap bulan	Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) / kertas kerja capaian indikator tidak	Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) / kertas kerja capaian indikator dapat ditelusur/ sama dengan dokumen

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	data)	monev (sumber data)	antara RHPK/kertas kerja dengan dokumen monev, termasuk mencari penyebab perbedaan 7. Dibuatkan lembar konfirmasi terkait justifikasi perubahan data yang dilaporkan 8. Dibuatkan kertas kerja penjelasan dan sumber data pembilang dan penyebut terperinci		dapat ditelusur/ berbeda dengan dokumen monev (sumber data), sebagai contoh indikator Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan pada triwulan II tahun 2024.	monev (sumber data).
	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SKP, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Form penyalarsan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggung jawab data dan Kepala UPT dan lembar konfirmasi perubahan data dan justifikasinya telah dibuat	3. Dibuatkan form penyalarsan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggung jawab data dan Kepala UPT 4. Dibuatkan lembar konfirmasi perubahan data dan justifikasinya	Setiap bulan	Terdapat Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja antara Simetris, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Tidak Terdapat Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja antara Simetris, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja lagi.
	Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;	Mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi	4. Menyusun kebijakan yang mengatur mekanisme pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) berdasarkan hasil	Februari 2025	Belum menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran	Mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi telah ditetapkan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
			pengukuran kinerja individu dan organisasi yang objektif dan terukur 5. Menyusun prosedur yang mengatur bagaimana proses pemberian reward dan punishment dilakukan. Prosedur ini harus mencakup mekanisme evaluasi kinerja, penentuan penerima reward atau punishment, serta jenis penghargaan dan sanksi yang akan diberikan. 6. Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai		kinerja individu dan/atau organisasi.	
	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS dilakukan secara tertib	Mengisi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara lengkap (berdasarkan form rencana tindak lanjut yang sudah dibahas setiap bulan pada rapat monev bulanan)	Setiap bulan	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS tahun 2024 belum dilakukan secara tertib	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS tahun 2024 dan 2025 dilakukan secara tertib
	Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi	Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS optimal	Mengisi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara lengkap (berdasarkan	Setiap bulan	Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS belum optimal	Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS sudah mencantumkan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	SIMETRIS secara memadai		form rencana tindak lanjut yang sudah dibahas setiap bulan pada rapat moneyv bulanan)		yaitu belum mencantumkan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target	kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target
	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	LEI direktif penugasan dan dievaluasi dalam Lapkin interim Tahun 2025	3. Menyusun penjelasan yang mencakup alasan dan latar belakang penambahan indikator kinerja, termasuk penambahan indikator direktif penugasan. 4. Menambah format laporan yang mencakup bagian khusus untuk menjelaskan indikator baru	April 2025	Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perjanjian Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024, yaitu: Nilai Pengelolaan BMN, Nilai Kualitas PBJ, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/	LEI direktif penugasan dan dievaluasi dalam Lapkin interim (Tahun 2025 IKU direktif penugasan tidak tercantum dalam PK dan RAPK)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					Kabupaten/Kota , Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT, Nilai Pengelolaan Kearsipan	
	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja;	Realisasi indikator kinerja antara SKP Kepala BPOM di Kediri, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja sama	3. Dibuatkan form penyelarasan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggungjawab data dan Kepala UPT 4. Dibuatkan lembar konfirmasi perubahan data dan justifikasinya	Setiap bulan	Terdapat Perbedaan realisasi indikator kinerja antara SKP Kepala BPOM di Kediri, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja (sama dg 2.d)	Tidak terjadi lagi perbedaan realisasi indikator kinerja antara SKP Kepala BPOM di Kediri, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja
	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya	Laporan Kinerja triwulan tahun 2025 menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi periode triwulan sebelumnya	3. Mengumpulkan data kinerja untuk setiap triwulan sebelumnya untuk dijadikan dasar perbandingan dengan kinerja triwulan tahun berjalan. 4. melakukan analisis terkait perubahan pencapaian kinerja antar triwulan dan menambahkan analisis tersebut dalam laporan,	TW I – TW IV	Laporan Kinerja triwulan II s.d. III tahun 2023 dan triwulan II s.d III tahun 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi periode triwulan sebelumnya	Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 sudah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi periode triwulan sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
			untuk menjelaskan penyebab atau faktor yang mempengaruhi perbedaan kinerja.			
	- Menyusun laporan Kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran - Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan analisis penyebab kegagalan secara memadai	Laporan Kinerja Tahunan - menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran - Analisis penyebab kegagalan terkait tidak tercapainya target indikator - Belum memadai (bukan merupakan kendala/ tidak mengidentifikasi akar masalah)	3. Penyusunan laporan kinerja interim membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya (sesuai dengan pedoman penyusunan Lapkin tahun 2025) 4. Menyajikan data analisis efisiensi dan penyebab kegagalan tidak tercapainya indikator (Bab III)	TW I – TW IV	Laporan Kinerja Tahun 2023: - Belum menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja persasaran - Analisis penyebab kegagalan terkait tidak tercapainya target indikator belum memadai (bukan merupakan kendala/tidak mengidentifikasi akar masalah)	Laporan Kinerja Tahun 2024 : - menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran - Analisis penyebab kegagalan terkait tidak tercapainya target indikator belum memadai (bukan merupakan kendala/tidak mengidentifikasi akar masalah)
	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja terkait implementasi SAKIP;	Personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja sudah mengikuti pelatihan terkait SAKIP	3. Identifikasi Personil yang Belum Mengikuti Pelatihan 4. Menentukan Jenis Pelatihan yang Diperlukan	TW II	Beberapa personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP	Personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja sudah mengikuti pelatihan terkait SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Evaluasi atas capaian RAPK triwulan bersangkutan	laporan evaluasi internal membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya	Penyusunan laporan evaluasi internal membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya (sesuai dengan pedoman penyusunan Lapkin tahun 2025)	TW I – TW IV	Laporan Evaluasi Internal triwulan III tahun 2024 belum menyajikan evaluasi atas capaian RAPK triwulan III tahun 2024 (menyajikan evaluasi atas capaian RAPK triwulan II tahun 2024);	laporan evaluasi internal membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya (sesuai dengan pedoman penyusunan Lapkin tahun 2025)
	Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Identifikasi kendala dan rekomendasi /rencana aksi secara memadai	Laporan Evaluasi Internal menyajikan Identifikasi kendala dan rekomendasi /rencana aksi secara memadai	3. Melakukan identifikasi kendala atau penyebab kegagalan pencapaian target. Dapat dengan memasukkan faktor eksternal seperti perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, atau masalah logistik. 4. Menyusun rencana aksi yang konkrit dan relevan untuk mengatasi setiap kendala yang ditemukan	TW I – TW IV	Laporan Evaluasi Internal belum mengidentifikasi kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target, rekomendasi/ rencana aksi kurang relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi dan/atau belum terdapat rencana aksi	Laporan Evaluasi Internal sudah mengidentifikasi kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target, rekomendasi/ rencana aksi kurang relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi
	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Monitoring tindak	Laporan Evaluasi Internal triwulan menyajikan monitoring tindak	4. Mengumpulkan Data Tindak Lanjut dari Triwulan Sebelumnya	TW I – TW IV	Laporan Evaluasi Internal triwulan I tahun 2024	Laporan Evaluasi Internal triwulan I tahun 2025 belum menyajikan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya	lanjut rencana aksi periode sebelumnya	5. Melakukan Verifikasi Implementasi: Memverifikasi apakah tindak lanjut yang telah ditentukan pada triwulan sebelumnya telah dijalankan 6. menentukan status close/Open setiap rencana aksi triwulan sebelumnya.		belum menyajikan monitoring tindak lanjut rencana aksi periode sebelumnya	monitoring tindak lanjut rencana aksi periode sebelumnya

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi kinerja diukur melalui perhitungan kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi (TE) dapat dihitung sebagai berikut :

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Dari 9 Sasaran Kegiatan yang dijabarkan menjadi 25 Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kediri, hanya terdapat 1 Indikator Kinerja dengan Tingkat Efisiensi 90% atau Efisien, yaitu pada indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Dimana perbandingan persentase capaian kinerja dan capaian anggaran yang tidak terlalu besar. Pada triwulan I telah direalisasikan pengadaan alat laboratorium yang mendukung realisasi anggaran pada capaian output tersebut dan hasil penilaian pemenuhan standar ruang lingkup laboratorium yang melebihi target. Sedangkan 24 Indikator Kinerja yang lain tingkat efisiensi 75% atau Tidak Efisien. Hal ini disebabkan adanya realisasi kinerja atau capaian output pada indikator tersebut namun realisasi anggaran masih rendah dibandingkan pagu anggaran pada triwulan I, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun yang menyebabkan perubahan pelaksanaan realisasi target kinerja
2. Capaian kinerja yang telah terealisasi namun realisasi anggaran bergeser di bulan April sehingga masuk pada serapan anggaran triwulan II, disebabkan
3. Target periodik triwulan I adalah progress tahapan kinerja, sedangkan target akhir tahun output kegiatan seperti jumlah sekolah, pasar, dan desa.

4. Target kinerja adalah target tahunan sehingga pengukuran realisasi ada pada akhir tahun

Pengukuran efisiensi pada triwulan I tahun 2025 terhadap indikator kinerja Balai POM di Kediri dapat dimanfaatkan untuk melihat indikator yang perlu peningkatan dan keselarasan capaian output dan input pada triwulan berikutnya.

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Kediri Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 148 Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Kediri Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret				Anggaran			Perhitungan Efisiensi					
				Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	Pagu awal	Revisi realisasi anggaran Maret	%capaian	capaian output	capaian input	ie	te	capaian	kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81.75	100	122.32	122.32	14,945,200	2,907,700	19.46	1.22	0.19	6.29	5.29	75%	Tidak Efisien
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO		0	0	0	8,970,000	-	0.00	-	0.00	-	-	-	Tidak Efisien
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	80	106.67	106.67	5,349,600	1,319,640	24.67	1.07	0.25	4.32	3.32	75%	Tidak Efisien
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	891,600	219,940	24.67	1.00	0.25	4.05	3.05	75%	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret				Anggaran			Perhitungan Efisiensi					
				Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	Pagu awal	Revisi realisasi anggaran Maret	%capaian	capaian output	capaian input	ie	te	capaian	kriteria
		5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	100	133.33	133.33	2,674,800	659,820	24.67	1.33	0.25	5.41	4.41	75%	Tidak Efisien
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	89	85	95.51	86.73	10,182,000	-	0.00	0.96	0.00	-	-	-	Tidak Efisien
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	100	107.53	107.53	5,388,300	170,000	3.15	1.08	0.03	34.08	33.08	75%	Tidak Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125		125	5,388,300	170,000	3.15	1.25	0.03	39.62	38.62	75%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret				Anggaran			Perhitungan Efisiensi					
				Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	Pagu awal	Revisi realisasi anggaran Maret	%capaian	capaian output	capaian input	ie	te	capaian	kriteria
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	100	108.40	108.40	13,122,000	860,000	6.55	1.08	0.07	16.54	15.54	75%	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	93	116.25	116.25	5,790,000	860,000	14.85	1.16	0.15	7.83	6.83	75%	Tidak Efisien
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87.97	99.37	112.95	112.95	1,156,600	428,000	37.01	1.13	0.37	3.05	2.05	75%	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	58	6.67	11.49	9.95	3214200.00	600,000	18.67	0.11	0.19	0.62	-0.38	-	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret				Anggaran			Perhitungan Efisiensi					
				Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	Pagu awal	Revisi realisasi anggaran Maret	%capaian	capaian output	capaian input	ie	te	capaian	kriteria
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8	9.83	122.88	70.21	983,348,000	710,063,080	72.21	1.23	0.72	1.70	0.70	90%	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84.37	89.92	106.58	0	18,551,800	3,014,000	16.25	1.07	0.16	6.56	5.56	75%	Tidak Efisien
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	5	5	100	-	28,466,600	-	0.00	1.00	0.00	-	-	-	Tidak Efisien
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	5	5	100	-	25,383,600	-	0.00	1.00	0.00	-	-	-	Tidak Efisien
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	5	5	100	-	15,263,600	-	0.00	1.00	0.00	-	-	-	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret				Anggaran			Perhitungan Efisiensi					
				Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	Pagu awal	Revisi realisasi anggaran Maret	%capaian	capaian output	capaian input	ie	te	capaian	kriteria
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	15	15	100	16.48	3,775,000	422,000	11.18	1.00	0.11	8.95	7.95	75%	Tidak Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	61	50	81.97	60.98	44,350,800	7,470,000	16.84	0.82	0.17	4.87	3.87	75%	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang	50	41.67	83.33	46.29	10,040,000	2,460,000	24.50	0.83	0.25	3.40	2.40	75%	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret				Anggaran			Perhitungan Efisiensi					
				Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	Pagu awal	Revisi realisasi anggaran Maret	%capaian	capaian output	capaian input	ie	te	capaian	kriteria
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Diselesaikan Sesuai Standar													
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT			0	0	16,870,000	3,910,000	23.18	-	0.23	-	-	-	Tidak Efisien
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			0	0	2,978,991,000	178,667,209	6.00	-	0.06	-	-	-	Tidak Efisien
		23	Nilai AKIP UPT BPOM					13,579,200	6,180,375	45.51	-	0.46	-	-	-	Tidak Efisien
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM					625,982,000	798,442,589	127.55	-	1.28	-	-	-	Tidak Efisien
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM					8,938,400	399,900	4.47	-	0.04	-	-	-	Tidak Efisien

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai POM di Kediri Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi secara periodik untuk pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Kediri terdiri dari 9 sasaran kinerja dengan 25 indikator kinerja utama.

Dari 9 sasaran kinerja, terdapat 7 (tujuh) sasaran kinerja yang dapat dilakukan evaluasi penilaian pada capaian TW I, sedangkan 2 (dua) sasaran kinerja lainnya evaluasi dilakukan pada periode akhir tahun dikarenakan sasaran kinerja tersebut memiliki target dan penilaian tahunan. Dari 7 (tujuh) sasaran kinerja yang ada terdapat 1 (satu) sasaran kinerja memiliki nilai capaian dengan kategori “Kurang”, 2 (dua) sasaran kinerja memiliki nilai capaian dengan kategori capaian “cukup”, 1 (satu) sasaran kinerja memiliki nilai capaian dengan kategori capaian “ Baik”, 2 (dua) sasaran kinerja memiliki nilai capaian dengan kategori capaian “ Sangat Baik” dan 1 (satu) sasaran kinerja memiliki nilai capaian dengan kategori capaian “ Tidak Dapat Disimpulkan”. diperoleh hasil semua memperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi “**BAIK**”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Capaian sasaran kinerja satu sebesar 107,10% dengan kategori “Sangat Baik”, , menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kediri dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kediri selama Triwulan I 2025.
- Capaian sasaran kinerja dua sebesar 11,5%% dengan kategori “**Kurang**”, menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pada sarana produksi pangan fortifikasi. Salah satu penyebabnya adalah adanya efisiensi anggaran pada awal tahun sehingga pelaksanaan pengawasan tidak bisa optimal.
- Capaian sasaran kinerja tiga sebesar 122,88% dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**” menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kediri dalam memenuhi

Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium selama Triwulan I 2025.

- Capaian sasaran kinerja empat sebesar 101,64% dengan kategori “**Sangat Baik**” menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri selama Triwulan I 2025.
- Capaian sasaran kinerja lima sebesar 100.00% dengan kategori “**Baik**”, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kediri dalam meningkatkan melakukan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu produk OBA, Kosmetik dan Pangan Olahan. Capaian ini dipengaruhi oleh koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor terkait serta pelaku usaha yang aktif ikut pendampingan selama Triwulan I 2025.
- Capaian sasaran kinerja enam lima sebesar 81,97% dengan kategori “**Cukup**”, menunjukkan belum optimalnya Balai POM di Kediri dalam mengawal peningkatan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kediri selama Triwulan I 2025.
- Capaian sasaran kinerja tujuh sebesar 83,32% dengan kriteria **Cukup**, menunjukkan belum optimalnya Balai POM di Kediri dalam mengawal terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Kediri selama Triwulan I 2025.
- Capaian sasaran kinerja delapan belum terdapat capaian di TW I 2025 karena merupakan penilaian tahunan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025.
- Capaian sasaran kinerja sembilan belum terdapat capaian di TW I 2025 karena merupakan penilaian tahunan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025.

Persentase capaian Indikator Kinerja Balai POM di Kediri pada triwulan I tahun 2025 antara 11,5 % sampai dengan 122,88 %. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi” disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pada sarana produksi pangan fortifikasi sebagai dampak dari efisiensi anggaran Sedangkan capaian indikator tertinggi pada indikator “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, faktor yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah

karena telah tersedianya laboratorium pengujian level 1 di Balai POM Kediri serta didukung dengan SDM yang kompeten dan berdedikasi.

4.2 Saran

1. Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori Baik/Sangat Baik pada Triwulan I tahun 2025.
2. Menindaklanjuti rekomendasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing indikator yang telah diuraikan pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang belum maksimal dalam pencapaiannya.

Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisiensi pada Triwulan I tahun 2024.

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GIDION

Jabatan : Kepala Balai POM di Kediri

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Kediri



GIDION

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KABUPATEN KEDIRI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.97 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.37 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78,55 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 24,253,063,000 (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	20,427,653,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,825,410,000

Kediri, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Kediri



GIDION

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	74,726,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,850,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	40,122,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25,455,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	4,458,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	25,455,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	26,941,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	26,941,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	65,610,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	28,950,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	5,783,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	16,071,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	4,916,740,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	92,759,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			5	10	25	25	35	45	70	75	100	4	142,333,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			5	10	25	35	50	60	70	80	100	1	126,918,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			5	10	25	60	70	90	100	100	100	1	76,318,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	35	50	55	60	75	80	85	91	18,875,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	61	61	61	66	66	71	71	71	71	71	71	82	221,754,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	50,200,000

		TARGET													
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	84,350,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	14,894,955,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.55	67,896,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,129,910,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	44,692,000
														Total	24,253,063,000

Kediri, 12 February 2025

Kepala Balai POM di Kediri


Gidion

SK IKU BPOM Kediri TAHUN 2025



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI NOMOR HK.02.02.19B.02.25.51 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

-2-

Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BALAI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI TAHUN 2025-2029. |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri. |

-3-

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KEDIRI,



ADION

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KEDIRI
NOMOR HK.02.02.19B.02.25.51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KEDIRI TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

-5-

SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
9.2	Nilai AKIP UPT BPOM
9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KEDIRI,



GIDION